



SERIAL BUKU PENGAWASAN PARTISIPATIF

PARTISIPASI DALAM PEMILU SECARA SADAR DAN CERDAS

*Panduan berdemokrasi dan berpolitik
yang selaras dengan Buddhadharma*





BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PARTISIPASI DALAM PEMILU SECARA SADAR DAN CERDAS

**Panduan Berdemokrasi dan Berpolitik yang
Selaras dengan Buddhadharma**

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Jl. M. H. Thamrin 14
Jakarta Pusat
Indonesia

PENGARAH

Abhan
Mochammad Afifuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Rahmat Bagja
Fritz Edward Siregar

PEMBINA

Gunawan Suswantoro

PENANGGUNG JAWAB

Ahmad Khumaidi

KETUA TIM

Feizal Rachman

WAKIL KETUA

Fathul Andi Rizky Harahap
Bugi K. Widiyanto
Erni Kusumastuty

PENELITI

Eko Nugroho Rahardjo
Masykurudin Hafidz
Muhammad Ikhsan
Deitry Aritonang
Muhammad Zaid
Nugroho Noto Susanto
Sarmidi Husna
Pdt. Hariman Pattianakotta
Antonius Beny Wijayanto
I Made Wirayasa
Peter Lesmana

ASISTEN PENELITI

Hanif Vidi Yuwono
Nurdiansyah
Kelfin Roy D. Boseran
Sonta S.
Aji Nugroho
Keke Eskatario
A. Farichin Beka
Asep Saepurrohman
Ike Aprilina
Sudarmin Nurdani
Riedo Adi Saputri

DESAIN & TATA LETAK

Mohd Chalel

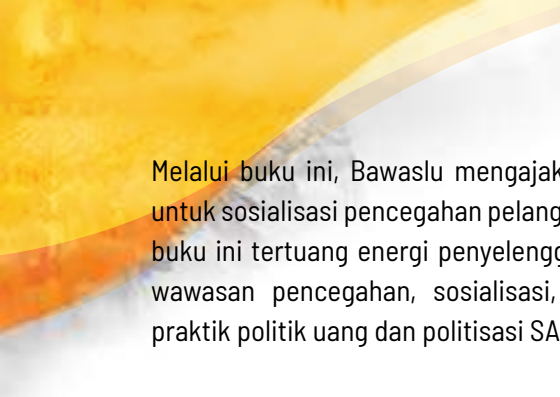
SAMBUTAN

Tokoh agama adalah aktor penting dalam melakukan pendidikan politik masyarakat. Tokoh agama juga pelaku utama yang mampu menyampaikan pesan kedamaian antarumat beragama terutama di tengah gejolak politik yang dapat membangun praktik politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Untuk itu, kehadiran literasi damai dan menyejukkan sangat dibutuhkan. Untuk menelurkan itu, Bawaslu menginisiasi sebuah gagasan sebagai bentuk upaya strategis agar para Tokoh agama dapat mendukung Pemilu yang terbebas dari praktik politik uang dan politisasi isu SARA. Dengan begitu dapat tercipta Pemilu yang aman dan berkualitas.

Gagasan untuk melibatkan tokoh-tokoh agama dalam menciptakan Pemilu damai, aman dan berkualitas dimanifestasikan dengan menggelar pertemuan-pertemuan. Forum-forum yang dibangun itu membahas persoalan-persoalan dalam Pemilu, pencegahannya dan solusinya. Dari pertemuan-pertemuan tersebut tergalaslah pembuatan Buku Materi Ceramah Pengawasan dengan Perspektif Agama.

Buku ini adalah referensi bagi para tokoh agama dalam menyampaikan materi pada masyarakat. Bawaslu berharap buku ini menjadi bahan bacaan yang dapat dipakai para tokoh agama untuk menyakinkan masyarakat bahwa semua agama mengajarkan melawan politik uang. Bahwa semua agama mengajarkan untuk tidak saling membenci sebagai bentuk politisasi SARA.



Melalui buku ini, Bawaslu mengajak tokoh agama menjadi agen untuk sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu. Sebab di dalam buku ini tertuang energi penyelenggaraan Pemilu yang berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA dalam Pemilu.

Pada akhirnya buku ini hadir sebagai oase baru di tengah-tengah maraknya isu politisasi uang dan SARA dalam pemilu. Sehingga ke depan, Pemilu dapat berjalan lebih baik, aman dan berkualitas.

“Bersama rakyat awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu”

Abhan

Ketua Bawaslu

PENGANTAR

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, baik sebagai peserta Pemilu, pengguna hak pilih, maupun sebagai pengawas dalam proses pemungutan suara sangat diperlukan sebagai wujud kepedulian dan keterlibatan nyata dalam penyelenggaraan negara. Akan tetapi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik di Indonesia akhir-akhir ini diwarnai dan dipenuhi dengan wacana politisasi SARA; meruncingnya primordialisme (pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertama); perselisihan antar pendukung partai atau aktor-aktor politik; merebaknya ujaran kebencian (*hate speech*); berita palsu dan informasi yang menyesatkan (*hoaks*); kampanye hitam, bahkan fitnah, yang menyebar melalui jejaring media sosial yang semuanya menimbulkan keresahan di masyarakat. Di samping itu praktik politik uang dan berbagai pelanggaran Undang-Undang Pemilu masih marak terjadi.

Menyikapi kondisi yang demikian, maka Bawaslu berupaya untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat khususnya dalam proses pengawasan Pemilu dengan melibatkan para cendekiawan dan tokoh agama melalui penyusunan Buku Ceramah Pengawasan Pemilu. Pada kesempatan ini, penulis selaku alumnus

HIKMAHBUDHI sekaligus mewakili komunitas Buddhis mendapat kepercayaan dari Bawaslu RI untuk menuangkan gagasan dan pemikiran dalam sebuah buku bergaya ilmiah populer. Buku ini diharapkan akan bisa menjadi bacaan penunjang bagi komunitas buddhis yang memerlukan suatu referensi dan panduan bila ingin berpartisipasi aktif dalam ruang demokrasi dan politik di Indonesia.

Buku ini terdiri atas lima bab yang membahas tentang landasan Dharma dan filosofi buddhis dalam demokrasi dan politik; akuntabilitas kepemimpinan yang selaras dengan Dharma; politik uang dan cara menghindarinya; tentang toleransi dan cara terhindar dari politisasi SARA; serta bagaimana menjadi pemilih yang sadar dan cerdas.

Target utama pengguna buku ini adalah para pandita, penceramah, dan dharmaduta yang memiliki ruang dan kapasitas menyampaikan pesan-pesan Dharma dan bisa memberikan arahan kepada umat agar dapat terlibat secara aktif, cerdas, dan berkesadaran dalam ruang demokrasi Pancasila. Diharapkan melalui penyampaian yang tepat, gagasan-gagasan dalam buku ini lebih jauh lagi akan dapat memotivasi umat Buddha untuk tidak lagi alergi dengan dunia politik dan bahkan secara positif dapat memaknai politik sebagai ladang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Dharma universal dan semangat Bodhisattva dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terakhir, tentu saja masih banyak yang perlu disempurnakan dari karya tulis ini. Untuk itu diharapkan masukan, kritik, dan saran dari sidang pembaca sebagai bahan penyempurna untuk edisi cetak berikutnya. Tak lupa ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Bawaslu RI; PP HIKMAHBUDHI, perwakilan MBI, Magabudhi, WBI, Wandani, Walubi dan SIDDHI yang terlibat aktif

dalam proses penyuntingan akhir, Rekan-rekan Institut Nagarjuna; dan kepada Pak Jo Priastana selaku penelaah tulisan ini, serta semua pihak yang berkontribusi hingga terselesainya buku ini.

Semoga Dharma semakin membumi dan dapat dirasakan manfaatnya dalam segala aspek kehidupan demi mewujudkan kebahagiaan bagi semua makhluk.

Appamadena sampadetha!

Eko Nugroho Rahardjo

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	5
-----------------	----------

BAB 01

LANDASAN DHARMA DAN FILOSOFIS BERDEMOKRASI SESUAI AGAMA BUDDHA	13
---	-----------

1. PENDAHULUAN : PERKEMBANGAN PRAKTIK-PRAKTIK DEMOKRASI DI INDONESIA 13
2. PERMUSYAWARATAN SEBAGAI PONDASI KERUKUNAN DAN KESEJAHTERAAN 17
3. PEMILU SEBAGAI INSTRUMEN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN 20
4. POLITIK DI SEBAGIAN NEGARA YANG DIPENGARUHI OLEH PERKEMBANGAN AGAMA BUDDHA. 22

BAB 02

AKUNTABILITAS KEPEMIMPINAN	37
-----------------------------------	-----------

1. PEMIMPIN POLITIK YANG SELARAS DENGAN DHARMA 37
2. RAJA-DHARMA SEBAGAI PEDOMAN 42
3. MEMILIH PEMIMPIN YANG MEMBERI SOLUSI DAN PERUBAHAN LEBIH BAIK 52

BAB 03

JADILAH PEMILIH CERDAS, TOLAK POLITIK UANG 57

1. UANG SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK 57
2. KESERAKAHAN SUMBER BENCANA SOSIAL 60
3. BEBAS DARI JEBAKAN DAN BELENGGU POLITIK UANG 65

BAB 04

TOLERANSI UNTUK MENGATASI ISU SARA DAN HOAKS 73

1. MENERIMA PERBEDAAN DENGAN HATI TERBUKA 73
2. PEMILU, PESTA DEMOKRASI UNTUK MERAYAKAN KEBINEKAAN DAN TOLERANSI 78
3. PEMIMPIN POLITIK HARUS MENJADI TELADAN SIKAP TOLERANSI 82
4. MENGHINDARI BAHAYA UJARAN KEBENCIAN DAN HOAKS MELALUI MEDIA SOSIAL 84

BAB 05

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT BUDDHIS DI INDONESIA 94

1. PENTINGNYA KETERLIBATAN DALAM PEMILU 94
2. PERAN SANGHA DAN PANDITA DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK UMAT 97
3. MEMILIH SECARA SADAR, CERDAS DAN BERTANGGUNG JAWAB 102

DAFTAR PUSTAKA 108

BAB 01

“ KOMUNITAS SPIRITUAL YANG BERLANDASKAN DHARMA, KEBENARAN YANG HAKIKI, DAPAT DIIBARATKAN SEBAGAI KUSIR KERETA YANG SEWAKTU-WAKTU DAPAT MENGEMBALIKAN ARAH DAN LAJU KERETA PADA JALURNYA.”

LANDASAN DHARMA DAN FILOSOFIS BERDEMOKRASI SESUAI AGAMA BUDDHA

1. PENDAHULUAN : PERKEMBANGAN PRAKTIK- PRAKTIK DEMOKRASI DI INDONESIA

Istilah demokrasi dan politik tentu tidak asing lagi di telinga warga bangsa Indonesia. Sebagai wacana pembuka di sini kita sedikit meninjau pengertian paling mendasar dari demokrasi yang secara umum diterima oleh masyarakat dunia dan yang khas dalam pemikiran bangsa Indonesia.

Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang artinya rakyat dan “kratos” yang artinya kekuasaan, jadi demokrasi secara terminologi berarti pemerintahan yang menghendaki kekuasaan oleh rakyat. Senada dengan itu, *founding father* kita, Soekarno, secara khas menawarkan demokrasi Indonesia sebagai suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Konsepsi demokrasi Soekarno dituangkan dalam bukunya *Di Bawah Bendera Revolusi* dengan istilah Trisila (seperti tertuang dalam risalah sidang BPUPKI/PPKI 1945) yang terdiri dari: 1) Sosio-nasionalisme, yang berarti nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memiliki watak sosial dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan; 2) Sosio Demokrasi, yang artinya bahwa demokrasi bukan semata-mata demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi, dan demokrasi yang berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. 3) Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya bahwa setiap rakyat Indonesia adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, apapun agamanya. Trisila Demokrasi

inilah yang kemudian berkembang menjadi demokrasi Pancasila. Suatu Sistem demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat yang bercita-cita mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

Sedangkan pengertian politik secara umum, menurut Surbakti (1992), diantaranya memiliki makna sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Pengertian lain, politik diartikan sebagai segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sudut pandang lain, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Jika ditinjau dari asal kata dan bahasanya, politik bersumber dari bahasa Yunani, *politikos*, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, yakni proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud dalam proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dalam pengertian klasik Aristoteles, politik dimaknai sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dengan demikian, secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa politik adalah cara bagaimana memperoleh kekuasaan, mempertahankannya, dan bagaimana membuat kebijakan untuk mengatur kekuasaan itu di tengah-tengah masyarakat suatu bangsa atau negara. Demokrasi adalah salah satu sistem yang bisa diterapkan dalam praktik politik sebuah negara di antara banyak sistem-sistem lain yang berkembang.

Indonesia adalah negara yang dalam praktik politiknya menggunakan sistem demokrasi konstitusional untuk mengatur sirkulasi kekuasaan dalam berbangsa dan bernegara. Demokrasi Indonesia disebut Demokrasi Pancasila. Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dapat kita temukan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Selain itu juga terdapat dalam dasar negara, Pancasila, sila keempat yang berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

Demokrasi Pancasila pasca kemerdekaan sempat mengalami masa suramnya, yaitu ketika demokrasi Pancasila berada di tangan Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Selama 32 tahun, Demokrasi Pancasila dirasakan hanya sebagai alat bagi penguasa orde baru untuk melanggengkan kekuasaannya yang penuh perilaku koruptif, sarat kolusif, dan nepotisme (KKN). Di masa itu dapat dikatakan Demokrasi Pancasila telah dibajak dan diselewengkan. Cita-cita demokrasi Pancasila untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial, selama 32 tahun tidak sungguh-sungguh dijalankan. Bila pun ada pembangunan, itu sifatnya hanya sebagai instrumen bagi penguasa yang korup.

Di era Orde Baru, yang benar-benar menikmati bagian besar dan manisnya kue pembangunan sesungguhnya adalah para penguasa dan pemilik modal (kekuatan kapitalisme). Sementara rakyat miskin hanya mendapat remah-remahnya. Pemerataan kesejahteraan tidak terjadi, ketimpangan ekonomi di mana-mana, modal dan pembangunan hanya berpusat di Jawa dan sebagian Sumatera serta daerah-daerah di mana sumber kekayaan alam bisa dieksploitasi oleh pemilik modal yang berkolusi dengan penguasa Orde Baru dan kroni-kroninya. Kekayaan alam yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat justru dikuasai oleh segelintir pemilik modal yang disokong penguasa dan dibentengi dengan kekuatan militer. Istilah demokrasi yang mensyaratkan kedaulatan di tangan rakyat tidak benar-benar terwujud. Demokrasi Ekonomi seperti dicita-

citakan Soekarno tidak terwujud. Demokrasi Pancasila yang semu justeru menjadi alat pengontrol bagi penguasa untuk membuat rakyat patuh dan tunduk tanpa adanya kedaulatan rakyat. Bila ada sekelompok masyarakat menyatakan sikap kritisnya atas kebijakan negara pasti akan segera dibungkam dengan cara-cara represif menggunakan kekuatan aparat militer. Dalam praktik politiknya memang ada *trias politicka*, yaitu dengan adanya lembaga eksekutif, legislatif (perwakilan rakyat, DPR/MPR), dan yudikatif. Tetapi lembaga-lembaga tersebut tak lebih sekadar perpanjangan tangan dari penguasa, sehingga fungsi *checks and balances* di antara tiga komponen politik itu tidak terjadi sesuai idealnya amanat demokrasi.

Sistem Pemilu yang menjadi instrumen demokrasi juga dilaksanakan dengan hanya ada dua partai (Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan) ditambah satu golongan partai penguasa (Golongan Karya). Hasil akhir Pemilu selalu bisa ditebak, partai golongan milik penguasa, Golongan Karya (Golkar) yang selalu berjaya dan menguasai suara di parlemen (DPR/MPR) dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan demikian maka arah pembangunan bangsa selalu disetir oleh partai penguasa tersebut. Periode ini adalah masa demokrasi tersuram dalam sejarah Indonesia merdeka. Sejarah itu tentunya perlu kita ingat dan jadikan pembelajaran bagi generasi saat ini dan seterusnya agar demokrasi yang diselewengkan; yang tidak lagi memiliki semangat dari, oleh, dan untuk rakyat; yang sekadar stempel legitimasi untuk melanggengkan kekuasaan diktaktor dan koruptif tidak terulang kembali.

Bukti nyata bahwa cita-cita dan amanat UUD 1945 telah diselewengkan oleh rezim Orde Baru adalah lemahnya ketahanan ekonomi nasional yang berujung pada krisis ekonomi 1997-1998. Praktik demokrasi dan politik yang tidak sehat di era Orde Baru

itu pun kemudian direbut oleh rakyat melalui gerakan reformasi di tahun 1998. Kaum terpelajar, aktivis pergerakan mahasiswa, dan pemuda berhasil membangkitkan kesadaran rakyat untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang selama itu telah dibajak dan diselewengkan oleh Orde Baru. Reformasi kemudian melahirkan upaya-upaya untuk mengembalikan Demokrasi Pancasila pada cita-cita awalnya. Walaupun banyak kendala dalam perjalanan reformasi hingga saat ini, namun berbagai kemajuan dalam praktik demokrasi telah kita capai.

Hari ini Indonesia disebut sebagai salah satu negara di Asia yang paling demokratis. Karena terbukti pasca kekacauan jatuhnya Orde Baru pada 1998, kita berhasil melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER) di tahun 1999 tanpa adanya gejolak berarti hingga dua dekade kemudian. Pemilu 1999 menjadi pesta demokrasi yang sukses membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia cukup memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi dan berpolitik.

2. PERMUSYAWARATAN SEBAGAI PONDASI KERUKUNAN DAN KESEJAHTERAAN

Kemudian bagaimanakah komunitas Buddhis memberikan makna bagi praktik politik dan demokrasi di Indonesia sehingga kita sebagai bagian dari bangsa ini dapat hidup selaras dengan semangat dan cita-cita luhur Demokrasi Pancasila?

Sulak Sivaraksa dalam makalahnya berjudul *Buddhism and The Challenge of Modernity in The 21st Century* menyatakan, bahwa roda kebenaran (*dhammacakka*) harus mampu mengontrol atau mempengaruhi roda kekuasaan

(*anacakka*). Bila roda kekuasaan tidak dikendalikan oleh penguasa dengan baik, maka akan menjadi kekuasaan yang korup. Menyikapi potensi negatif yang mungkin muncul dari kekuasaan politik maka dalam kondisi ini Sangha atau komunitas spiritual, harus mengimbangnya dengan roda kebenaran (*dhammacakka*). Komunitas spiritual yang berlandaskan Dharma, kebenaran yang hakiki, dapat diibaratkan sebagai kusir kereta yang sewaktu-waktu dapat mengembalikan arah dan laju kereta pada jalurnya.

Sangha (persaudaran para biksu/biksuni) yang terdiri dari orang-orang yang mengembangkan kebijakan merupakan kunci dari prinsip-prinsip demokrasi di dalam Buddhis. Bisa jadi *Sangha* adalah lembaga demokratis yang tertua di dunia. Umurnya sekarang hampir dua puluh enam abad. Buddha menetapkan peraturan (*vinaya*) bagi anggota *Sangha*, bahkan memperbaikinya dengan mempertimbangkan opini masyarakat. Berdasarkan peraturan *Vinaya*, *sangha* juga menyelesaikan berbagai persoalan internal dengan cara musyawarah. Tradisi bermusyawarah ini dilakukan secara rutin pada hari *uposatha*.

Dalam suatu kesempatan di saat-saat menjelang *parinibbana* (meninggal) Buddha secara tegas menganjurkan agar para biksu senantiasa melakukan musyawarah demi kebaikan *Sangha*. Demikian beberapa pesan Buddha dalam *Maha-parinibbana Sutta* (DN 16), "Hendaknya kalian, para biksu yang telah berjumlah besar ini terus berkumpul dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Di dalam pertemuan-pertemuan, para biksu hendaknya selalu menganjurkan persatuan dan perdamaian." Tentunya anjuran ini sangat selaras dengan semangat sila ke-4 sekaligus sila ke-3 Pancasila.

Pesan Buddha selanjutnya, “Hendaknya para biksu tidak menetapkan aturan-aturan baru (diluar yang telah disepakati) dan tidak menghapuskan yang telah ada. Hendaknya mereka berbuat sesuai dengan peraturan disiplin (*vinaya*) yang telah ada.” Anjuran ini dalam konteks Indonesia sesuai dengan semangat agar kita senantiasa berpegang pada 4 Pilar Kebangsaan; NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan konsensus bersama yang telah kita sepakati secara nasional.

Pemikiran Buddhis dalam bernegara menginginkan negara kesejahteraan, bukan negara kekuasaan. Hal ini tentunya selaras dengan semangat Demokrasi Pancasila. Kewibawaan pemerintah, kedaulatan, dan ketahanan suatu bangsa atau negara sangat tergantung pada kesejahteraan rakyatnya. Buddha Gotama mengajarkan tujuh syarat kesejahteraan negara tersebut ketika menunjukkan kebiasaan Suku Vajji yang senantiasa bermusyawarah dan rutin mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi suku mereka. Tujuh syarat itu adalah:

1. Sering mengadakan pertemuan dan permusyawaratan yang mengikutsertakan orang banyak (menjalankan apa yang sekarang ini kita sebut demokrasi),
2. Berhimpun, berkembang, hingga mencapai mufakat dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan rukun,
3. Menjunjung konstitusi (kesepakatan) yang berlaku, tidak memberlakukan apa yang belum diundangkan, dan tidak juga mengabaikan apa yang telah diundangkan,
4. Menghormati dan menyokong para sesepuh atau pemimpin yang bijaksana, juga memperhatikan amanat mereka,

5. Melindungi dan menghormati kedudukan wanita (atau pihak yang lemah),
6. Memelihara dan tidak mengabaikan kewajiban agama,
7. Melindungi orang-orang suci dan bijaksana,

Dengan tujuh pedoman itu Buddha menjamin bahwa Suku Vajji akan selalu memiliki kekuatan, sulit ditaklukkan, dan memiliki kesejahteraan (DN II, 74-75).

3. PEMILU SEBAGAI INSTRUMEN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sendiri sudah dilakukan sejak tahun 1955. Awalnya untuk memilih anggota legislatif seperti DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dimasukkan ke dalam rangkaian Pemilu. Pada tahun 2004 diadakan Pemilu yang salah satu rangkaianannya untuk memilih presiden secara langsung dengan prinsip *one man one vote*.

Asas LUBER berkembang di era Reformasi, kemudian ditambahkan Jujur dan Adil atau disingkat JURDIL; Jujur, Asas jujur mempunyai arti dimana penyelenggara pemilu, aparat, peserta, pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Adil, asas adil maksudnya adalah adanya perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tidak adanya pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Kemudian dalam penyelenggaraannya harus memenuhi

prinsip: *Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien* (Sesuai Pasal 2 UU No.22 tahun 2007).

Selain mempunyai asas dan prinsip pemilu juga memiliki tujuan yang harus dicapai sesuai. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, Tujuan yang hendak dicapai melalui proses pemilu dalam demokrasi Pancasila adalah:

1. Melaksanakan kedaulatan rakyat
2. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat
3. Untuk memilih kepala daerah, wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden
4. Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).
5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Pada setiap tahapan pemilu yang sedang berjalan, ada ruang partisipasi politik dan kepedulian masyarakat agar proses pemilu berjalan secara jujur dan adil, sekaligus harapan agar lahir kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Menurut *Agganna-sutta*, fenomena demokrasi dan kedaulatan di tangan rakyat yang hari ini kita kenal sebagai praktik Pemilihan Umum (Pemilu), dapat diikuti dari sejarah lahirnya suatu kontrak sosial untuk membentuk pemerintahan.

Pada mulanya manusia dilahirkan tanpa perbedaan kedudukan. Masing-masing dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi kehidupan yang damai mulai terganggu ketika manusia yang serakah mencuri dari tetangganya, mereka yang licik menipu, dan mereka yang kuat menindas mereka yang lemah.

Menghadapi keadaan yang tidak harmonis itu, masyarakat pada waktu itu memilih salah seorang di antara mereka yang dianggap cakap dan berwawasan untuk mengadili orang-orang yang bersalah.

Sebagai bentuk penghargaan atas jasa orang pilihan itu, masyarakat membayar dengan sebagian dari hasil ladangnya. Penguasa yang bijak itu dipilih oleh orang banyak dan diangkat melalui persetujuan masyarakat. Penguasa itu disebut *Maha Sammata* (Pilihan Agung). Dalam perkembangan selanjutnya penguasa itu disebut ksatria (*katthiya*) karena ia berkuasa atas tanah pertanian yang merupakan tanah komunal (negara). Kemudian ia disebut sebagai raja karena sosoknya dicintai rakyat dan mengingat kepatuhannya menjalankan kebajikan, hukum, dan keadilan. (DN III, 92-93)

Buddha mengakui perlunya kekuasaan pemerintahan yang dijalankan secara benar. Kekuasaan tidaklah dimaksudkan dengan bagaimana memaksakan kehendak manusia. Dikemukakan dalam *Aganna Sutta*, kekuasaan itu menyangkut kesanggupan untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh masyarakat. Tidak ada penguasa tanpa kehendak rakyat, karena itu seorang penguasa adalah abdi masyarakat yang berpegang pada Dharma, demikian dinyatakan dalam *Cakkavatti Sutta*, "Seorang penguasa dunia, raja yang adil dan luhur yang tergantung pada kebenaran (Dharma), ia menghargai, menjunjung tinggi dan menghormati Dharma, dengan hukum kebenaran (Dharma) sebagai panji, bendera dan kekuasaannya" (AN III. 14).

4. POLITIK DI SEBAGIAN NEGARA YANG DIPENGARUHI OLEH PERKEMBANGAN AGAMA BUDDHA.

Perlu kiranya kita memiliki prespektif lebih luas tentang praktik politik dan demokrasi di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ataupun yang secara politik dipengaruhi dengan kuat oleh perkembangan agama Buddha. Hal ini penting untuk membuka cakrawala komunitas buddhis bahwa agama Buddha adalah bagian tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Paragraf-paragraf selanjutnya akan memaparkan sekilas bagaimana secara khas agama Buddha mempengaruhi sendi-sendi kehidupan perpolitikan negara-negara tersebut.

Thailand. Meskipun Thailand Berbentuk monarki, memiliki raja sebagai penguasa tertingginya sejak 1932 namun dalam kekuasaan sebenarnya ada di tangan para elite, terutama militer tapi juga tingkatan birokrasi yang lebih tinggi. Sistem politik yang dianut adalah Monarki Konstitusional. Thailand memiliki perdana menteri sebagai aktor politik yang menjalankan roda pemerintahan. Politikus dipilih secara demokratis dan melalui sistem pemungutan suara sebagai sumber sah legitimasi nasional.

Terlepas dari corak politik orang-orang tertentu yang berkuasa, raja tetap menjadi simbol penting, dan ideologi publik menegaskan bahwa agama, raja, dan bangsa saling terkait erat. Rakyat pun memberikan penghormatan yang tinggi dan mencintai rajanya. Meskipun sisitem monarki yang ditopang agama Buddha sangat kuat tetapi Thailand dalam konstitusinya tidak mengenal istilah agama resmi.

Kebebasan beragama diberikan kepada seluruh warga negara Thai, meskipun raja yang disahkan secara hukum harus beragama Buddha Theravada dan agama utama yang dipraktikkan di Thailand adalah Buddha.

Sekitar 94.63% dari jumlah penduduk di Thailand adalah Buddha dari aliran Theravada. Tetapi Penduduk Tionghoa Thai juga mempraktikkan agama tradisional Tionghoa, termasuk Tao. Beberapa etnis lainnya, khususnya kelompok etnis *Isan*, mempraktikkan agama tradisional Thai. Umat Muslim kebanyakan beretnis Melayu Thai, jumlahnya cukup signifikan yang berdomisili di wilayah Thailand Selatan. Meskipun khusus untuk menyatakan kritik terhadap raja masih sangat dibatasi tetapi toleransi yang memberikan kebebasan berekspresi, menyuarakan pendapat, dan mengaktualisasikan potensi diri di Thailand sangat terjamin dan dilindungi oleh Undang-Undang. Tentunya ini adalah pengaruh dari ajaran filosofis buddhis yang menghargai potensi setiap manusia dan menjunjung hak-hak asasi manusia.

Nepal. Buddha lahir di negara yang sekarang menjadi negara Nepal. Hanya sekitar 10 persen populasi Nepal yang beragama Buddha, namun demikian secara umum penduduk Nepal lebih banyak merasakan kedekatan dengan agama ini dan tidak suka jika orang luar mengklaim bahwa Buddha adalah orang India. Bagi mereka itu adalah salah satu kebanggaan nasional. Walaupun umat Buddha hanya 10 persen namun hampir semua partai politik di Nepal berkeinginan untuk mengangkat pemimpin agama Buddha sebagai wakil mereka di pemerintahan dengan harapan memenangkan suara pengikut mereka. Oleh karena itu mereka menerima

undangan untuk menjadi “tamun utama” pada acara penting Buddhis penting. Mereka pun mendukung Buddha sebagai guru pembawa damai yang relevansi ajarannya hingga saat ini diakui. Beberapa biksu telah dinominasikan ke legislatif nasional oleh partai politik; Sebagai contoh, Bhiksu Ashwaghosha telah dinominasikan oleh Partai United Marxist-Leninist (UML), sementara Maois telah mencalonkan Bhiksu Ananda dan Lharkyal Lama. Terkait kepentingan politik kerajaan Nepal, ada inisiatif di sisi negara Nepal untuk memanfaatkan agama Buddha. Seperti inisiatif King Birendra pada tahun 1980-an untuk menjadikan Nepal dikenal sebagai “Zona Damai” yang khas didasarkan semangat ajaran Buddha.

Setelah bertahun-tahun berkampanye untuk umat Buddha, pemerintah pun kemudian mendirikan Universitas Buddha Lumbini yang menyediakan fasilitas pendidikan tinggi tingkat Master. Dari waktu ke waktu pemerintah menjadi sponsor konferensi internasional di Lumbini dalam upaya untuk menopang dukungan Buddhis. Konferensi Buddhis yang paling terkenal diadakan di Kathmandu. Diantaranya adalah yang dihadiri oleh Dr. Ambedkar pada tahun 1956, sebagai penanda genapnya 2.500 tahun sejak parinirvana Buddha sesuai dengan kronologi yang paling banyak diterima di kalangan masyarakat Buddhis internasional.

Dalam revolusi Nepal terdapat satu kelompok gerakan politik yang bernama Janajati. Kelompok ini sukses mengubah Nepal yang tadinya kerajaan Hindu menjadi kerajaan sekuler. Upaya Janajati itu sukses dengan mengandalkan dukungan komunitas Buddhis yang ditopang penuh secara politis dan militer oleh kaum Maois. Namun jatuhnya monarki dan jatuhnya ideologi Hindu yang terkait erat dengannya juga disebabkan oleh keras kepala dan

kurangnya keterampilan politik raja terakhir. Bagaimanapun, komunitas Buddhis, Maois, dan Janajatis, terutama di antara mereka yang menyukai negara sekuler dan republiken telah memenangkan perjuangan politik dan mengubah wajah Nepal menjadi lebih sekuler dan demokratis. (Gellner et al 2016)

Sri Lanka. Masyarakat Sri Lanka memeluk berbagai agama. Menurut sensus 2011, 70,19 persen orang Sri Lanka adalah Buddha Theravada, 12,6 persen adalah Hindu, 9,7 persen adalah Muslim (utamanya Sunni) dan 7,4 persen Kristen (6,1 persen Katolik Roma dan 1,3 persen Kristen lainnya). Pada 2008, Sri Lanka merupakan negara paling religius ketiga di dunia menurut jajak pendapat Gallup, dengan 99 persen orang Sri Lanka berkata bahwa agama adalah bagian penting dalam kehidupan keseharian mereka. Kiprah politik umat Buddha di Sri Lanka dapat dikatakan memiliki gerakan yang sangat progresif dan sangat berpengaruh di negara itu. Anagarika Dharmapala, ayah dari nasionalisme Buddha Sinhala modern adalah sosok yang memberi momentum yang sangat berpengaruh pada akhir abad 19 dan awal abad 20 karena dengan penuh keberanian menentang peraturan Kolonial Inggris yang menindas. Secara kumulatif, pengalaman historis tersebut telah meninggalkan kesan mendalam dalam jiwa banyak umat Buddha. Mereka percaya Sri Lanka adalah benteng terakhir agama Buddha Theravada di dunia. Dalam perkembangannya muncul pula beberapa kelompok pinggiran ultra nasionalis seperti *Bodu Bala Sena* (BBS) yang sepak terjangnya tidak bisa dibanggakan dan bahkan tidak mencerminkan kearifan ajaran Buddha yang penuh welas asih. Mungkin ini suatu contoh buruk dari fanatisme terhadap

agama Buddha yang bercampur dengan nasionalisme yang berlebihan (*ultra nationalism*) dan cenderung destruktif/merusak.

Selain fenomena tersebut, ada pula partai buddhis *Jathika Hela Urumaya* (JHU) atau dapat diartikan dalam bahasa Inggris sebagai *National Heritage Party*. JHU adalah partai politik nasional sayap kanan di Sri Lanka. JHU diluncurkan pada bulan Februari 2004 oleh barisan politik nasional Sinhala, Sinhala Urumaya. Anggota pendiri JHU termasuk biksu Kolonnawe Sumangala Thero, Uduwe Dhammaloka Thero, Ellawala Medhananda Thero, Omalpe Sobhitha Thero, Athuraliye Rathana Thero, dan Thilak Karunaratne. Beberapa umat Buddha Sri Lanka, termasuk *All Island Clergy Organization*, mengecam keputusan para biksu untuk memasuki dunia politik. Namun demikian partai ini mendapat dukungan terutama dari kalangan konservatif kelas menengah dan kaum muda Buddhis. *Jathika Hela Urumaya (National Sinhala Heritage)* memperebutkan pemilihan parlemen pertamanya pada tanggal 2 April 2004. Pada kesempatan itu, semua kandidatnya adalah para biksu senior. Pada pemilihan tersebut partai JHU memenangkan 5,97 persen suara rakyat (sebanyak 552.724 suara) dan sembilan dari 225 kursi di prlemen. JHU juga berafiliasi dengan Gerakan Nasional Anti Terorisme (NMAT), SPUR, Organisasi Sinhala Timur Laut (*East East East Sinhala Organization/NESO*) dan kelompok nasionalis Sinhala lokal dan internasional lainnya. Sejak pemilihan, partai tersebut telah terlibat dalam sejumlah isu kontroversial; satu tindakan penting adalah mendorong diberlakukannya sebuah Undang-Undang untuk melarang konversi agama secara tidak etis, manipulatif dan sangat agresif. Undang-Undang itu sebagai

reaksi keras atas tindakan proselitisme yang secara masif dan sistematis dilakukan oleh kaum fundamentalis Kristen yang berafiliasi dengan LSM asing.

Pada bulan Oktober 2005, mantan anggota JHU Uduwe Dhammaloka mengindikasikan bahwa ada sentimen negatif terhadap para biksu JHU, sebab secara nyata telah terjadi pelanggaran *Vinaya* (disiplin kebhikkhuan) karena secara langsung memasuki dunia politik praktis. Dhammaloka menyatakan bahwa dia secara pribadi yakin, para biksu dapat memberi dampak positif pada masyarakat Sri Lanka dengan memusatkan perhatian pada pekerjaan keagamaan. Ia pun sepakat bila anggota parlemen yang juga biksu, secara serius, “memastikan bahwa para biksu tidak akan memasuki politik praktis lagi”. Tidak jelas kapan Uduwe Dhammaloka dan anggota parlemen yang ditahbiskan lainnya akan mengundurkan diri dari posisi mereka, atau mungkin menunggu jika telah ditetapkan sebuah undang-undang yang secara tegas membatasi biksu menduduki jabatan publik (seperti yang terjadi di Thailand).

Kiprah politik lain dari Jathika Hela Urumaya adalah mereka berhasil mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk memotong masa jabatan Presiden Chandrika Kumaratunga. Kemudian JHU mendukung Presiden Mahinda Rajapakse dalam pemilihan presiden pada tahun 2005. Pada tahun 2007, JHU secara resmi menjadi bagian dari Pemerintahan Rajapakse dengan salah satu anggota parlemen biksu senior, Omalpe Thero. Tak lama kemudian beliau mengundurkan diri dan menunjuk penggantinya seorang *Upasaka* (umat Buddha awam yang terpercaya) Champika Ranawaka untuk mengisi kursi anggota parlemen dan kemudian menduduki posisi strategis dalam Kabinet

sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Tindakan Omalpe Thero yang mengundurkan diri dari parlemen tersebut nampaknya sebagai indikasi bahwa para Bhiksu secara bertahap menarik diri dari dunia politik praktis dan kembali pada tugas mulianya sebagai pertapa Buddhis yang sesuai *Dharma* dan *vinaya*.

Bhutan. Sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berbentuk Kerajaan dan dikenal dengan sebutan Negeri Naga Guntur. Wilayahnya terhimpit antara India dan Republik Rakyat Tiongkok. Nama lokal negara ini adalah *Druk Yul*, artinya "Negara Naga". Gambar naga pun didapati di benderanya dan lambang negaranya. Pemerintahan yang dijalankan dengan kekuasaan monarki absolut berakhir ketika konstitusi baru dan pemilihan perdana menteri dilaksanakan. Kini Bhutan menganut sistem Monarki Konstitusional. Raja Jigme Singye Wangchuk yang memimpin sejak tahun 1972 mengumumkan menggelar pemilu tahun 2008, sekaligus turun takhta. Sebelumnya pada 1998, Raja Jigme Singye Wangchuk memperkenalkan reformasi politik signifikan, memindahkan sebagian besar kekuasaan-nya kepada Perdana Menteri. Pada 1999. Raja ke-4 Bhutan itu menciptakan badan 10 anggota yang disebut Lhengye Zhungtshog (Dewan Menteri). Posisi Raja Bhutan saat itu tetap sebagai kepala negara. Kekuasaan Eksekutif dilaksanakan oleh Lhengye Zhungtshog, dewan menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Nasional.

Pengumuman pengunduran diri Raja disampaikan di hadapan 8.000 penggembala hewan yak, biksu, petani, dan siswa pedesaan pada 18 Desember 2005. Pengumuman disebarakan melalui Harian Kuensel. Sebelumnya, Raja memperkenalkan rancangan konstitusi dan menyatakan pensiun pada usia 65 tahun. Atas ide ini, sebagian rakyat tidak sependapat karena khawatir terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), namun pada tahun 2006, Sang Raja tetap mengundurkan diri dan digantikan oleh puterandanya. Pada tahun 2008, Bhutan menciptakan sejarah dengan memperkenalkan demokrasi parlementer, sehingga kerja-kerja politik berubah dan partai politik kini menjadi resmi. Dalam sistem baru ini terdapat parlemen yang terdiri dari majelis tinggi (setara MPR dalam sistem Indonesia) dan majelis rendah (setara DPR di Indonesia) —anggota majelis rendah terafiliasi dengan partai-partai politik. Pemilihan anggota majelis tinggi dilaksanakan untuk pertama kalinya pada Desember 2007 sementara pemilihan anggota majelis rendah dilaksanakan pada Maret 2008. Partai Perdamaian dan Kesejahteraan Bhutan memenangi pemilihan majelis rendah dengan meraih 44 dari 47 kursi.

Pada 1987 seorang wartawan dari Financial Times (Britania Raya) menulis dengan nada mendiskreditkan, bahwa perkembangan di Bhutan lambat. Menanggapi tudingan sepihak itu Sang Raja pun memberikan pernyataan tegas, bahwa "Pertumbuhan Kebahagiaan Nasional (Growth National Happiness/GNH) lebih penting daripada Produk Domestik Bruto (PDB)." Pernyataan ini memberi pertanda penemuan terkini oleh para psikolog ekonomi Barat, termasuk penerima Nobel 2002 Daniel Kahneman, yang mempertanyakan hubungan antara tingkat pendapatan

dan kebahagiaan. Raja menunjukkan komitmennya untuk membangun ekonomi yang paling pas untuk budaya Bhutan yang unik, yakni pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai spiritual agama Buddha, dan seterusnya berlaku sebagai visi ekonomi yang terintegrasi dalam sistem demokrasi Bhutan. Di samping itu, tampaknya kebijakan itu mendapat hasil yang diharapkan seperti dalam survei terkini yang dilakukan oleh Universitas Leicester di Britania Raya, Bhutan diurutkan sebagai tempat/negara bangsa paling bahagia ke-8 di atas bumi.

Tibet. Sejarah Tibet sangatlah panjang. Tetapi bila terkait dengan pergeseran politik kekuasaan Tibet dari negara otokratis religius menuju demokrasi tentu ada di masa pasca invasi Tiongkok 1950 hingga era milenial kini. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menginvasi Tibet pada tahun 1950 dan menegosiasikan 17 poin kesepakatan dengan pemerintahan Dalai Lama ke-14 yang baru bertakhta. Kesepakatan itu menegaskan kedaulatan Tiongkok atas seluruh wilayah Tibet walaupun Tiongkok masih memberikan otonomi daerah bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Dalai Lama XIV. Menolak untuk tunduk pada penjajahan Tibet dan 17 *agreement* yang ditawarkan Tiongkok, Dalai Lama XIV pun memilih berjuang dalam pengasingan dan konsisten menunjukkan penolakannya atas penjajahan Negeri Tirai Bambu itu. Selama perjuangannya di pengasingan, beliau banyak mengunjungi benua Eropa dan bertukar gagasan dengan para pemimpin pemerintahan di dunia Barat. Nampaknya gagasan demokrasi dari dunia Barat memberikan pengaruh signifikan bagi Dalai Lama sehingga dengan berani beliau mempersiapkan Tibet untuk berubah sistem politiknya. Dari

sistem Otokrat Religius, – yang di mana Beliau merangkap sebagai kepala pemerintahan setara raja, sekaligus sebagai pemimpin spiritual bagi penganut mayoritas Agama Buddha di Tibet, – kini berubah menuju sistem demokrasi modern.

Antara abad XVII dan 1959, Dalai Lama adalah kepala pemerintahan Tibet, Beliau mengendalikan sebagian besar negara dari ibukota Lhasa. Dalai Lama adalah garis *tulku* dari pemimpin aliran *Gelugpa* yang dapat dilacak kembali sampai 1391. *Tibetan Buddhists* percaya bahwa Dalai Lama adalah perwujudan insani dari *Bodhisattva Avalokitesvara*, calon Buddha yang penuh welas asih. Dalai Lama didaulat dan dipercaya penuh sebagai kepala *Tibetan Buddhism* sekaligus *Lama* tertinggi dalam tradisi Tibet oleh para pemimpin dari keempat aliran besar. Beliau sering dipanggil “*His Holiness*” (atau HH) sebelum gelarnya.

Di era Millenial ini, Dalai Lama bukan hanya membawa bangsa Tibet memasuki era baru dalam pemerintahan modern menjadi pemerintahan demokrasi. Dalai Lama juga patut dijadikan teladan bagi seluruh pemimpin politik di Indonesia ataupun dunia bahwa kepemimpinan tradisional dan otokrat sudah tidak kapabel dan tidak kompeten untuk memimpin rakyat modern. Dalai Lama, memutuskan mengakhiri sistem politik yang sudah berjalan di negeri tersebut selama 369 tahun. Dalai Lama tak lagi bersedia menjadi pemimpin politik bagi bangsa Tibet. Keputusan itu tetap dipegangnya dengan teguh meski ia telah menerima permintaan berulang dan sungguh-sungguh dari dalam dan luar Tibet untuk tetap meneruskan kepemimpinan politik.

Penerima hadiah Nobel perdamaian berusia 75 tahun itu mengatakan, “Ini semua demi masa depan institusi Dalai Lama dan demi kepentingan rakyat Tibet untuk jangka

panjang". Keputusan pengunduran diri Dalai Lama dalam urusan pemerintahan dan politik tersebut sulit diterima rakyat Tibet. Hal ini karena secara tradisi dan budaya sulit dilepaskan dari ketergantungan terhadap Dalai Lama. Dalai Lama mengatakan sistem dwifungsi kepemimpinan tersebut dianggap sudah tak memadai lagi pada abad modern ini. "Sekarang, abad ke-21, era pemerintahan raja dan pemuka agama sudah lewat. Jadi dalam kesempatan ini, saat 99 persen rakyat Tibet masih percaya dan menghormati saya, saya dengan gembira dan secara sukarela menyerahkan seluruh kekuasaan politik kepada pemimpin terpilih," Ujar Dalai Lama.

Pengunduran diri Dalai Lama dari panggung politik Tibet sebelumnya sudah melalui proses yang sudah dirancang sejak 1960-an. Tibet bahkan sudah menerapkan sistem demokrasi selama 10 tahun sejak menggelar Pemilu pertama untuk memilih calon *tripa* atau ketua kabinet pada 2001. Sejak itu posisi Dalai Lama sebenarnya sudah semipensiun.

Widodo Judarwanto dalam artikelnya di *Kompasiana* (2014) menguraikan, bahwa pengunduran diri Dalai Lama ini dapat dijadikan inspirasi dan teladan bagi para pemimpin dunia dan Indonesia lainnya yang masih gemar mempertahankan kepemimpinan tradisional atau otokrat. Pemimpin tradisional dan otokrat itu bisa saja pemimpin monarki, pemimpin militer, kerajaan, kesultanan, dan pemimpin agama lainnya. Di Indonesia yang sudah menjadi contoh negara demokrasi terbesar di Asia, ternyata masih menyimpan pemerintahan tradisional seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan di dunia masih banyak kepemimpinan otokrat lainnya yang tidak demokratis dan tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan modern

bagi rakyatnya. Memang ada sebagian pemimpin tradisional yang masih dibutuhkan rakyatnya tetapi sebagian lainnya tidak dikehendaki rakyatnya. Sebenarnya, mereka yang masih dibutuhkan rakyatnya juga secara tanpa disadari secara manajemen modern tidak menguntungkan rakyatnya di masa depan.

Dalai lama membawa inspirasi bagi pemimpin lain bahwa kepercayaan dan penobatan yang berlebihan dari rakyatnya tidak akan disalahgunakan. Berbeda seperti para pemimpin otokrat yang lain di seluruh dunia, Dalai Lama adalah seorang visioner yang berpikiran ke depan, Beliau ingin membebaskan rakyatnya dari belenggu ketidakmapanaan kepemimpinan tradisional menuju kepemimpinan modern yang demokratis dan profesional. Keputusan Dalai lama ini adalah keputusan fenomenal yang layak mendapatkan apresiasi masyarakat dunia.

Masih banyak lagi negara yang di dalam perpolitikannya ataupun sistem pemerintahannya mendapat pengaruh dari filosofi Buddhis maupun gerakan masyarakat Buddhis, di antaranya Jepang, Korea Selatan, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, Tiongkok, dan Taiwan. Apa yang sudah dipaparkan di atas adalah bahan referensi bagi umat Buddha di Indonesia agar memahami betapa nilai-nilai filosofis dan bahkan kiprah/gerakan-gerakan komunitas umat Buddha di negara-negara tersebut berpengaruh signifikan bagi bangsanya.

Dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri pengaruh Agama Buddha pernah membawa kejayaan bagi Nusantara. Kita punya catatan sejarah panjang tentang bagaimana kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pernah jaya dan berada di masa keemasan di bawah kekuasaan raja atau ratu yang beragama Buddha. Kiranya wawasan ini perlu kita kaji dan

gali kembali untuk meneguhkan komitmen kebangsaan umat Buddha di Indonesia dan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan kita dalam ruang demokrasi Pancasila.

BAB 02

DENGAN MEMEGANG PEMAHAMAN DHARMA TENTANG PRINSIP “KESALINGTERGANTUNGAN”, MAKA SEMESTINYA PEMIMPIN POLITIK MEMPOSISIKAN DIRINYA SEBAGAI BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI MASYARAKAT PENDUKUNGNYA.

AKUNTABILITAS KEPEMIMPINAN

1. PEMIMPIN POLITIK YANG SELARAS DENGAN DHARMA

Pada umumnya ketika kita berbicara tentang kepemimpinan politik, kita selalu terbawa dalam konsepsi persaingan dan perebutan kekuasaan. Persepsi tersebut tidak salah sepenuhnya, sebab sesuai pengertian politik itu sendiri diantaranya adalah sebagai kegiatan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

Sebagai seorang Buddhis yang memahami Dharma dan termotivasi untuk mewujudkan kebahagiaan bagi semua makhluk (*sabbe satta bhavantu sukhitata*), tentunya kita akan memilih praktik politik dengan pengertian yang lebih positif. Sebab pengertian tersebut jelas selaras dengan prinsip kesalingtergantungan (*paticca-samuppada*): “Dengan timbulnya ini maka timbullah itu, dengan adanya ini maka adalah itu, dengan padamnya ini maka padamlah itu, dengan tidak adanya ini maka itupun tidak ada” (SN II, 28).

Dengan memegang pemahaman Dharma tentang prinsip “kesalingtergantungan”, maka semestinya pemimpin politik memposisikan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat pendukungnya. Ia tidak mungkin eksis dan memegang kedudukan sebagai pemimpin bila tidak ada pendukung-pendukung yang berkontribusi dengan

memberikan suara untuknya. Sama halnya dengan pemimpin yang menyadari tentang keberadaannya yang tak terpisah dari konstituennya maka kita sebagai masyarakat pemilih pun perlu menyadari kondisi ini. Hendaknya sebagai konstituen menyadari bahwa partisipasi kita sekecil apa pun, suara yang kita berikan akan berdampak bagi orang yang kita pilih dan bagi lingkungan di mana pemimpin yang dipilih berkuasa di kemudian hari. Jika kita salah memilih maka bisa saja kita merasakan penderitaan sendiri akibat dari memilih pemimpin politik yang ingkar janji atau justru berubah menjadi penindas, misalnya. Demikian sebaliknya, jika kita tepat memilih pemimpin yang cakap dan berintegritas, maka banyak manfaat yang bisa kita harapkan benar-benar terealisasi.

Pemimpin politik harus senantiasa menyadari bahwa posisi yang dipegangnya saat ini pun ada batasnya. Ada faktor-faktor yang bisa mengakibatkan kekuasaan politiknya bisa berakhir. Kekuasaan dalam tingkatan apapun tidak bisa terhindar dari hukum perubahan (*anicca*). Segala yang muncul karena syarat-syarat tertentu maka cepat atau lambat akan lenyap oleh sebab-sebab tertentu pula (*anicca lakkhana*). Seberapa besar pun upaya untuk mempertahankan kekuasaan, cepat atau lambat pasti akan berakhir, ini adalah kebenaran (*Dharma*) yang abadi dan tak terelakkan. Hanya orang dungu (*moha*) yang tidak bisa menerima kenyataan ini lalu bersikeras menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya.

Kehausan (*bhava-tanha*) akan kekuasaan akan berujung pada perasaan selalu merasa kurang dan ketidakpuasan; tidak puas karena kekuasaannya kurang besar, jabatannya kurang tinggi dan pengaruhnya kurang

luas. Politikus yang selalu berpikiran demikian niscaya hidupnya tidak akan tenang dan akan dirundung kegelisahan. Semua itu adalah bentuk penderitaan (*dukkha*) yang dilandasi kekeliruan presepsi/pandangan (*avijja*) tentang kekuasaan.

Buddha memberikan keteladanan bahwa bahkan beliau tidak tertarik untuk menjadi pemimpin bagi *Sangha* untuk selama-lamanya. Ini karena Buddha menyadari keberadaannya akan ada batasnya, cepat atau lambat ia harus meninggalkan orang-orang yang dipimpinnya. Dikisahkan dalam Mahāparinibbāna-sutta (DN 16), pada suatu kesempatan ketika Ananda siswa yang setia mendampinginya menanyakan, siapa yang akan melanjutkan memimpin *Sangha*? Buddha menyatakan, “Ananda, tidak pernah terpikir oleh saya bahwa para biksu bergantung pada saya atau saya mengatur *Sangha*. Tetapi apapun ajaran yang telah saya berikan kepada *Sangha* dan Aturan Disiplin (*vinaya*) yang telah saya tetapkan dapat menjadi

**“KEMENANGAN
MENIMBULKAN
KEBENCIAN DAN
YANG KALAH HIDUP
DALAM PENDERITAAN.
SETELAH DAPAT
MELEPASKAN DIRI DARI
KEMENANGAN DAN
KEKALAHAN. ORANG
YANG PENUH DAMAI
AKAN HIDUP BAHAGIA”
(DHAMMAPADA XV.201).**

pemimpin mereka.” Ajaran ini bisa kita maknai pula bahwa Dharma ajarannya dan *vinaya* (disiplin kebhikkhuan) adalah ibarat konstitusi (dalam konteks demokrasi kekinian) yang dapat dijadikan pedoman, alih-alih tergantung pada sosok pemimpin yang keberadaannya tidak kekal abadi, bisa berganti sewaktu-waktu. Sedangkan *Dharma* dan *Vinaya* (konsensus-konsensus dan konstitusi yang telah disepakati

bersama) tetap bisa digunakan sebagai pedoman ketika rakyat ditinggal oleh pemimpin politiknya. Ini jelas suatu keteladanan dari pemimpin yang demokratis, bijak, dan tidak terbelenggu pada kekuasaan yang dimilikinya.

Pendekatan Buddhis terhadap kekuatan politik adalah moralitas dan penggunaan kekuasaan publik yang bertanggung jawab. Buddha mengajarkan non-kekerasan dan perdamaian sebagai pesan universal. Buddha tidak menyetujui kekerasan atau penghancuran kehidupan, dan menyatakan bahwa tidak ada yang namanya 'perang adil'. Buddha mengajar: "Kemenangan menimbulkan kebencian dan yang kalah hidup dalam penderitaan. Setelah dapat melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan. Orang yang penuh damai akan hidup bahagia" (Dhammapada XV.201). Buddha tidak hanya mengajarkan non-kekerasan dan perdamaian, Buddha mungkin adalah guru agama pertama dan satu-satunya yang pergi ke medan perang secara pribadi untuk mencegah pecahnya perang. Dengan bijak, Buddha meredakan ketegangan antara suku *Sakya* dan *Koliya* yang akan melakukan perang untuk memperebutkan aliran air sungai *Rohini* untuk mengairi sawah-sawah kedua suku. Buddha menganjurkan agar mereka saling berbagi. Buddha juga membujuk Raja Ajatasattu agar mengurungkan niatnya untuk menyerang Kerajaan Vajji.

Kualitas pemimpin politik yang sangat penting dimiliki adalah Integritas. Seorang pemimpin dengan integritas dapat dipercaya dan akan dikagumi karena berpegang pada nilai-nilai yang kuat. Dalam *Lokasutta* (Ittivutaka 122) Buddha menyatakan bahwa pemimpin yang kredibel adalah ia yang melaksanakan apa yang ia ajarkan, "Mereka melakukan apa yang mereka katakan dan mengatakan apa yang mereka lakukan." Inilah yang dimaksud dengan moto "*Yathavadi* -

Tathakari, Yathakari-Tathavadi.” Tentu saja Buddha adalah teladan ideal bagi para biksu/biksuni untuk ditiru dalam aspek integritas ini.

Buddha dalam *Salekkha Sutta* (MN 8) menyatakan ketidakpercayaannya bahwa orang yang tidak bermoral tanpa prinsip yang benar dapat memimpin orang lain. Buddha bersabda, “Tidak mungkin orang yang tenggelam di lumpur dapat menarik orang lain yang tenggelam di lumpur. Tapi sangat mungkin seseorang yang tidak tenggelam dalam lumpur dapat menarik orang lain yang tenggelam di lumpur.”

Etika kepemimpinan dalam pemerintahan atau mengenai perilaku para penguasa terdapat dalam sabda Buddha di *Cakkavati Sihananda Sutta* (DN 5) yang berisi:

1. Seorang penguasa yang baik harus bersikap tidak memihak dan tidak berat sebelah terhadap rakyatnya. Ia tidak pilih kasih (tidak membeda-bedakan karena pamrih tertentu),
2. Seorang penguasa yang baik harus bebas dari segala bentuk kebencian terhadap rakyatnya,
3. Seorang penguasa yang baik harus tidak memperlihatkan ketakutan apapun dalam penyelenggaraan hukum jika itu dapat dibenarkan,
4. Seorang penguasa yang baik harus memiliki pengertian yang jernih akan hukum yang diselenggarakan. Hukum harus diselenggarakan tidak hanya karena penguasa mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan hukum. Tapi dijalankan dalam suatu sikap yang masuk akal dan pikiran sehat.

Di era tumbuhnya demokrasi dan menguatnya *civil society* (masyarakat sipil), seorang pemimpin harus mampu untuk konsisten dan berkomitmen menjalankan amanat konstitusi yang merupakan representasi dari kehendak rakyat.

2. RAJA-DHARMA SEBAGAI PEDOMAN

Menurut *Aganna Sutta* (DN 27), definisi etimologis yang diberikan pada istilah 'raja' yaitu '*Dhammena janam ranjetiti raja*' berarti bahwa "la yang membuat senang orang lain dengan Dharma, (dengan melaksanakan prinsip kebenaran) adalah apa yang dimaksud dengan Raja." Dengan demikian maka setiap pemimpin, harus menjaga kelompoknya tetap bahagia dengan kebijakan yang baik. Seorang pemimpin bukanlah bos yang terus memberi perintah dan menggunakan tindakan keras agar setiap orang mengikuti perintahnya. Dengan teknik komunikasi yang baik, dia harus menghormatinya bukan dengan paksaan tapi dengan cara yang menyenangkan. Dia harus menjadikan dirinya orang yang menyenangkan untuk tinggal bersama.

Sepanjang riwayat Buddha menyebarkan ajarannya dari Nepal hingga ke seluruh dataran India, Buddha banyak berinteraksi dengan para raja dan penguasa wilayah, yang tentunya penguasa-penguasa itu adalah pengendali politik pemerintahan di masanya. Beliau sendiri pada awalnya adalah seorang pangeran dari kerajaan *Kapilavathu*. Tentunya kehidupan dan seluk beluk pemerintahan dan kekuasaan politik kerajaan bukan hal yang asing baginya. Dalam riwayatnya disebutkan raja-raja yang sangat berkuasa pada masa itu beberapa menjadi murid dan penyokong setianya.

Beberapa yang sangat populer sebut saja Raja Bimbisara beserta istrinya Ratu Khema penguasa kerajaan *Magadha*; Raja Pasenadi penguasa kerajaan *Kosala*; Raja Sudhodana penguasa *Kapilavatthu* yang adalah ayah dari Buddha Gotama sendiri; Pangeran Suppabudha yang adalah mertua dari Pangeran Siddharta; Pangeran Ajjatasattu pewaris tahta Raja Bimbisara, dan lain-lain.

Memiliki pengikut awam dari kalangan penguasa, tentu sedikit banyak melibatkan Buddha dalam beberapa persoalan politik kerajaan. Meskipun beliau sangat membatasi diri dalam urusan politik tetapi sudah menjadi kebiasaan di mana raja-raja memerlukan penasihat spiritual yang bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan bijak dalam mereka mengelola pemerintahannya. Walaupun membatasi bersinggungan dengan kekuasaan, sebagai seorang guru yang dihormati dan setiap perkataannya didengar dan dipatuhi oleh para raja, Buddha pun memiliki kesempatan untuk memberikan wejangan yang bermanfaat bagi langgengnya kekuasaan raja sekaligus bermanfaat bagi rakyat yang berada di bawah kekuasaan mereka.

Bila kemudian dengan pengaruh kekuasaan para raja membuat ajaran Buddha menjadi semakin tersebar ke segala penjuru, itu tak lebih dari dampak kebajikan dan keluhuran Dharma yang diajarkannya dan manfaat-manfaat nyata yang dirasakan setiap penguasa dari menjalankan Dharma. Sebab tidak ada satu ayat pun dalam *tripitka/tipitaka* dapat ditemukan misi ajaran Buddha agar menjadi agama yang bisa berkuasa secara politik. Menggunakan atau menunggangi ajaran Buddha sebagai alat kekuasaan adalah sebuah kesalahan besar dan menyimpang dari misi Buddha Dharma itu sendiri. Tak ada sedikit pun niat untuk

memenuhi pamrih pribadi yang dilandasi kehausan akan kekuasaan ataupun fasilitas-fasilitas mewah bagi Buddha maupun pengikutnya. Anjuran-anjuran bijak yang diajarkan kepada para raja dan pangeran agar bisa diterapkan dalam kekuasaan politik mereka adalah semata-mata demi mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. Hal itu adalah implementasi dari misi Buddha, yaitu membabarkan Dharma demi kebahagiaan semua makhluk. Di antara anjuran Buddha bagi para raja yang paling populer dan telah banyak mewujudkan kelanggengan kekuasaan para raja dari sejak zaman Bimbisara hingga Ashoka adalah *Dasa Rajadharma*; sepuluh Dharma/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh raja jika ingin dicintai rakyatnya sehingga kekuasaannya bertahan untuk waktu yang lama.

Dalam kisah *Jataka* (KN V. 378), disebutkan bahwa pemimpin harus memenuhi 10 kewajiban (*Dasa Rajadharma*). Kesepuluh hal tersebut dapat dijadikan kriteria atau tolok ukur bagi seorang pemimpin. Kesepuluh hal tersebut adalah:

1. Dana (Kemurahan Hati)

Sebagai pemimpin harus memiliki sifat murah hati, mau memberi, dan menolong. Tidak pilih-pilih terhadap siapa yang akan ditolongnya. Dalam konteks kekinian, kemurahan hati ini dapat ditunjukkan oleh gubernur misalnya. Di Indonesia seperti kita ketahui kepala daerah walaupun bergaji minim sebagai pejabat PNS namun seorang gubernur atau bupati mendapatkan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai dana operasional yang nilainya tidak sedikit (senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah) dan itu menjadi hak mereka untuk bebas menggunakannya tanpa harus mempertanggungjawabkan ke negara. Seorang kepala daerah yang kikir dan serakah

tentu akan menyimpan pendapatan itu hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Tetapi seorang kepala darah yang murah hati dapat memanfaatkan kelimpahan harta yang dimilikinya dari dana operasional dan PAD itu untuk membantu warganya yang masih miskin dan kekurangan, atau yang mengalami kesulitan-kesulitan kebutuhan hidup.

2. Sila (Memiliki Moral atau Melaksanakan Sila)

Memiliki moral yang baik sehingga dapat menjadikan dirinya sebagai teladan atau panutan. Ini dapat dilakukan dengan menjalankan *sīla* (menghindari pembunuhan, pencurian, asusila, berkata tidak benar, dan minum minuman keras). Perilaku yang selaras dengan 5 (lima) sila ini sangat mudah dikenali. Pemimpin politik yang bersusila; Pertama, Tidak akan berlaku kejam kepada rakyatnya, ia juga mencegah terjadinya kekerasan dan penganiayaan terhadap rakyatnya. Kedua, ia akan malu jika sampai korupsi dan ia akan memastikan para koruptor yang merugikan negara akan diganjar hukuman yang berat. Untuk mencegah terjadinya pencurian dia akan berupaya menyediakan lapangan kerja yang cukup dan berupaya memberikan upah yang layak bagi kesejahteraan para buruh dan pekerja sehingga tidak ada pengangguran yang bisa menjadi penyebab timbulnya kejahatan pencurian atau perampokan; Ketiga, dirinya tidak akan mengumbar nafsu untuk menikmati hubungan seksual dengan memiliki banyak selir atau istri simpanan. Dia akan menjamin keselamatan anak-anak dan para perempuan dari para predator seks dan kekerasan seksual. Keempat, ia menghindari berkata dusta atau ingkar janji. Ia akan berusaha keras mewujudkan janji-janji politiknya agar secara terukur dapat direalisasikannya. Kelima, dirinya menghindari mengonsumsi zat-zat yang dapat

menimbulkan kecanduan seperti rokok, alkohol, narkoba, dan sejenisnya. Sejalan dengan itu pemimpin yang demikian akan memastikan dalam daerah kekuasaannya tidak boleh ada peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang yang dapat merusak generasi muda dan merugikan kesehatan masyarakat.

3. *Pariccāga* (Rela Berkorban)

Sorang pemimpin harus mau mengorbankan kesenangan pribadi untuk kepentingan orang banyak, artinya tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak mengedepankan ego. Mau berkorban, berarti mau berkorban materi, tenaga, pikiran, dan terutama waktu. Pemimpin yang rela berkorban akan bekerja keras siang dan malam demi memastikan kemajuan daerahnya dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinya. Pemimpin yang demikian tidak akan bisa bersenang-senang dan menikmati segala fasilitas negara, sementara banyak rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan. Tanpa berniat memuji atau menyanjung-sanjung tokoh tertentu; contoh kerelaan berkorban ini seperti ditunjukkan oleh founding father kita Bung Hatta. Walaupun beliau seorang wakil presiden tapi diketahui bahwa hingga akhir hayatnya, Bung Hatta tidak menikmati kekuasaannya sebagai pejabat tinggi untuk kesenangannya sendiri. Bahkan untuk memiliki sepasang sepatu *bally* yang diidam-idamkannya pun beliau tak mampu membelinya. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengserkan dari kursi kekuasaannya oleh lawan politiknya namun beliau tidak memaksakan diri untuk terus berkuasa. Dengan kerelaan hati dan lapang dada beliau mundur dari kursi kepresidenan, padahal jika menghendaki dengan kekuatan pendukungnya, warga *Nahdliyin* dan partai pengusungnya

bisa saja beliau mempertahankan kekuasaannya. Tetapi beliau sadar bahwa jika bertahan maka akan berpotensi terjadi tragedi politik dan perang saudara sesama anak bangsa Indonesia.

4. *Ajjava* (Ketulusan Hati)

Ketulusan hati di sini berarti seorang pemimpin dalam melaksanakan kerjanya tanpa pamrih pribadi. Ia berbuat sepenuh hati tanpa ada niat atau motivasi terselubung lainnya, misalnya karena memberikan keuntungan bagi kepentingan-kepentingan politik atau ekonomi kepada kroni, partainya dan golongannya saja. Kita bisa meneladani ini dari para *founding fathers* Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang tulus berjuang memerdekakan bangsa ini. Demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mereka rela ditangkap dan dipenjara, bahkan dibuang dan ditinggalkan bertahun-tahun oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Ketika berhasil merebut kemerdekaan, tidak membuat mereka haus kekuasaan dan memaksakan kehendaknya untuk berkuasa karena merasa sudah banyak berjasa. Jika mereka kemudian menjadi pemimpin di negeri ini adalah semata-mata karena kehendak rakyat. Bisa dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin politik di era milenial ini yang penuh ambisi mengiklankan diri agar terpilih walaupun tidak jelas rekam jejak dan karyanya di masyarakat.

5. *Maddava* (Ramah Tamah)

Seorang pemimpin harus mampu bersikap ramah tamah, dalam pengertian, ia bersedia diajak untuk berunding dan bertukar pikiran. Sekalipun menjadi penguasa negara ia mau menerima masukan dari rakyatnya. Pemimpin yang

demikian tentunya juga rendah hati, tidak sombong, dan suka bertegur sapa dengan warganya. Ia terhubung dengan masyarakat yang dipimpinnya tanpa terkesan canggung dan berjarak. Ia selalu bisa mendengarkan masukan dari pihak lain dan menyenangkan diajak berdiskusi untuk menemukan berbagai solusi yang dihadapi warganya. Cerminan keramahan ini juga nampak pada sosok seperti Bung Karno yang mudah didekati rakyatnya. Selain itu, ada sosok K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang sangat merakyat juga memiliki selera humor yang tinggi, sehingga selalu ada suasana menyenangkan dan ringan. Begitulah pemimpin yang ramah, mudah didekati dan akrab dengan masyarakat kelas bawah sekalipun.

6. *Tapa* (Kesederhanaan)

Memiliki kesederhanaan baik dalam ucapan atau perbuatan jasmani (tingkah laku). Seorang pemimpin yang memiliki kesederhanaan tersebut akan mendapatkan tanggapan baik dari masyarakat. Tentang kesederhanaan di negeri ini sangat banyak contohnya. Kesederhanaan tercermin dari gaya hidupnya. Pemimpin yang sederhana umumnya tidak rewel dalam kebutuhan dan mudah dilayani. Dia tidak pilih-pilih dalam menggunakan fasilitas. Tidak gemar mengendarai kendaraan mewah atau alat transportasi kelas satu atau VIP. Mereka yang sederhana tidak canggung dan kikuk ketika harus berdesakan di kendaraan kelas ekonomi atau makan di warung kaki-lima pinggir jalan. Pemimpin seperti ini tidak menginginkan tempat tinggal atau tempat menginap yang mewah dan mahal dalam perjalanan dinas. Ia pun tidak gemar memamerkan perhiasan, aksesoris bermerk mahal dan berdandan, ataupun berpenampilan mewah yang berlebihan.

7. *Akkodha* (Tidak Pemarah)

Pemimpin harus bebas dari kebencian dan tidak menyimpan dendam. Seorang pemimpin hendaknya membangun sifat demikian sehingga ia akan menciptakan kedamaian, baik bagi dirinya dan lingkungannya. Sangat berbahaya bila pemimpin memiliki sifat pendendam dan mudah terpancing emosi kemarahannya. Pemimpin yang penuh amarah akan cenderung memosisikan negaranya dalam situasi tegang dan potensi peperangan. Ia yang tidak pemarah adalah yang mudah memaafkan dan menyukai perdamaian. Pemimpin yang demikian selalu mengupayakan kondisi tanpa permusuhan. Ia tidak mudah tersinggung. Bila mendengar suatu perkataan atau melihat suatu kejadian yang buruk atau kurang menyenangkan, ia tidak reaktif. Jika dihina, dilecehkan, dan diserang melalui berbagai cara atau media apapun, pemimpin *Akkodha* tidak reaktif menyerang balik si pengkritik atau si perundung.

8. *Avihimsa* (Tidak Melakukan Kekerasan)

Seorang pemimpin harus memimpin tanpa kekerasan, baik itu melalui jasmani atau ucapan, dan berusaha tidak menghancurkan lawan terlebih lagi kawan. Sikap tanpa kekerasan dapat dilihat dari contoh tindakan Dalai Lama, Aung San Suu Kyii, Thich Naht Hanh, maupun Gandhi. Mereka para pemimpin politik dan pemerintahan yang memilih jalan tanpa kekerasan. Penindasan dan penjajahan yang mereka alami tidak membuat mereka kehilangan kedamaian batin. Mereka tidak terpancing untuk bertindak brutal dengan balas mengangkat senjata untuk melawan bangsa-bangsa ataupun lawan politik yang menyerangnya. Sikap itu bukan karena mereka takut, tapi karena mereka paham betul bahwa cara-cara kekerasan bukanlah jalan

yang baik dan bukan pula solusi. Mereka yakin bahwa kekerasan yang dibalas dengan kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan yang lebih besar lagi dan lebih dahsyat daya hancurnya. Maka dari itu mereka memilih memancarkan welas asih dan pemaafan. Tetapi itu tidak berarti tanpa perjuangan dan perlawanan. Perjuangan dengan jalan damai memang panjang untuk ditempuh tetapi hasilnya akan jauh lebih lama bertahan daripada berjuang dengan tangan terkepal sambil menghunus senjata untuk saling menghancurkan. Sebab kehancuran di pihak manapun dari akibat perang hanyalah berbuah penderitaan dan ratap tangis.

9. *Khanti* (Kesabaran)

Seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus diiringi dengan sikap sabar dan telaten dalam memimpin dan dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada dalam masa kepemimpinannya. Ia yang mengembangkan sikap sabar adalah orang yang tidak bereaksi negatif ketika sedang menghadapi kondisi sulit atau tidak menyenangkan. Ia memilih cara-cara dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap perselisihan. Selain itu sikap *khanti/ksanti* ini juga memiliki makna keuletan, daya elastisitas, tahan banting, dan pantang menyerah. Pemimpin biasanya akan menghadapi banyak tantangan dan kendala-kendala. Pemimpin yang dapat diandalkan adalah yang ketika menghadapi kendala dan kesulitan dia tetap tabah, ulet, dan berupaya keras menggunakan segenap sumber daya untuk memecahkan problematika yang dihadapinya. Dengan keuletan, tekad yang kuat dan kebijaksanaan maka kesulitan apapun akan dapat teratasi. demikian wejangan Buddha dalam *Jatakamala XIV.11*.

10. *Avirodhana* (Tidak Bertentangan dengan Kebenaran)

Artinya seorang pemimpin harus mampu melaksanakan aturan-aturan yang ada pada tempat ia memimpin, dimana aturan-aturan tersebut menjadi dasar kebenaran dalam ruang lingkup kepemimpinannya. Kriteria ini sangat relevan dengan kebutuhan pemimpin dalam sistem demokrasi konstitusional. Di dalam sistem ini, kepemimpinan politik berpegang pada Konstitusi sebuah negara, artinya pemimpin taat asas dan taat pada konstitusi serta konsensus-konsensus serta kontrak politik yang pernah dibuatnya bersama para pendukung dan mitra kerjanya baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pemimpin yang demikian tidak akan seenaknya mengubah peraturan-peraturan tanpa melalui pertimbangan, masukan, dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Ia tidak sewenang-wenang dalam menetapkan dan menerapkan peraturan baru. Ia tidak sembarangan menabrak Undang-Undang. Contoh pemimpin yang menabrak peraturan, misalkan ada seorang gubernur yang mengubah fungsi jalan raya yang secara Undang-Undang Lalu Lintas adalah untuk jalur transportasi kendaraan bermotor tetapi diubah menjadi lapak pedagang kaki lima (PKL). Di saat yang sama ia juga mengubah trotoar yang seharusnya secara Undang-Undang jelas sebagai fasilitas khusus bagi para pejalan kaki tetapi justru diijinkan untuk dikuasai oleh PKL untuk menggelar dagangan. Bahkan akibat kebijakannya yang buruk itu, ia mendapat teguran keras dari lembaga Ombudsman. Perilaku pemimpin yang demikian adalah gambaran pemimpin yang bertentangan dengan hukum dan kebenaran yang telah menjadi konsensus bersama.

3. MEMILIH PEMIMPIN YANG MEMBERI SOLUSI DAN PERUBAHAN LEBIH BAIK

Salah satu masalah vital bagi kedamaian dan kemajuan suatu bangsa/negara adalah terpenuhinya kebutuhan rakyat; sandang, pangan, papan, dan kebutuhan mengaktualisasikan diri. Kepemimpinan suatu negara demokratis diharapkan oleh rakyatnya dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera, damai, tenang, tanpa konflik, hidup tanpa tekanan, dan tanpa rasa was-was.

“Seorang penguasa dunia adalah raja yang adil dan luhur yang tergantung pada kebenaran (Dhamma/Dharma), yang menghargai, menjunjung tinggi dan menghormati (Dharma)-nya, dengan hukum kebenaran sebagai panji, bendera dan kekuasaan-nya,” (AN 3. 14). Dalam hal ini seorang penguasa dunia, raja yang adil dan luhur adalah yang bergantung pada hukum kebenaran sebagai panji, bendera dan kekuasaannya. Dialah yang memberikan perlindungan, naungan, keamanan, bagi ksatria yang melayaninya, bagi bala tentaranya, bagi para brahmana dan perumah tangga, bagi penghuni kota dan desa, bagi pertapa dan brahmana, bagi semua makhluk, baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan.

Seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan dan kekuasaan hendaknya dapat mengatasi kemiskinan dan juga kejahatan yang ada dalam kepemimpinannya. Dengan memberikan dana kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian melakukan pengawasan dengan ketat, menegakkan hukum kepada yang bersalah dan membuat peraturan-peraturan yang berlaku dan wajib dipatuhi oleh masyarakatnya, sehingga masyarakat dapat bebas dari kejahatan.

Dalam Kutadanta Sutta (DN 4) dikisahkan; bahwa dalam salah satu kehidupan Buddha di masa lampau, memerintahlah seorang raja bernama Mahavijito. Saat itu dalam kerajaannya mengalami kekacauan, kemiskinan di mana-mana, kriminalitas meningkat, dan masyarakat dalam keresahan. Penasihat kerajaan (*bodhisattva*) pun memberikan petuah kepada raja; “Kerajaan sedang dalam kekacauan. Ada perampok yang merajalela di desa-desa dan kota-kota dan mengakibatkan jalan-jalan tidak aman. Bilamana hal itu masih seperti itu, lalu raja akan menarik pajak, maka raja akan bertindak salah. Namun bilamana raja berpendapat, ‘saya akan segera menghentikan perampok-perampok itu dengan cara penangkapan, mendenda, mengikat dan menghukum mati!’ Tetapi kejahatan itu tidak akan lenyap dengan cara seperti itu. Karena penjahat yang tak tertangkap akan tetap melakukan kejahatan. Ada sebuah cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan kekacauan ini. Siapa saja dalam kerajaan yang hidup sebagai peternak dan petani, raja harus memberikan makanan dan bibit kepada mereka. Siapa saja dalam kerajaan yang hidup sebagai pedagang, raja harus memberikan modal kepada mereka. Siapa saja dalam kerajaan yang hidupnya sebagai pegawai negara, raja harus pula memberikan gaji dan makanan yang secukupnya kepada mereka. Dengan orang-orang itu melaksanakan pekerjaan mereka masing-masing, maka pendapatan negara akan meningkat, kerajaan akan aman dan damai, serta rakyat akan senang dan bahagia, mereka akan menari dengan anak-anak mereka dan mereka hidup dengan rumah yang aman.” Demikian sepenggal kisah yang mencontohkan sebuah solusi bijak dari seorang pemimpin dalam mengatasi kekacauan di negara yang diperintahnya.

Penekanan Buddha pada tugas moral seorang penguasa untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat telah mengilhami Raja Asoka pada abad ketiga sebelum Masehi untuk berbuat demikian (*Dipavamsa dan Mahavamsa*). Raja Asoka, adalah contoh seorang raja yang berhasil dengan prinsip ini. Ia berketetapan untuk hidup menurut *Dhamma* dan membabarkan *Dhamma* dalam wujud nyata melalui kebijakan dan konstitusi dalam negaranya. Kepemimpinannya adalah sebuah bentuk pelayanan yang tulus untuk rakyatnya, tak hanya semua manusia melainkan semua makhluk, binatang, dan tumbuhan yang ada dalam jangkauan kekuasaannya. Dia mengajarkan tanpa kekerasan kepada kerajaan-kerajaan tetangganya. Ia meyakinkan mereka dan mengirim utusan, menawarkan kerjasama bilateral, perdamaian, dan tanpa agresi kepada kerajaan-kerajaan tetangga. Dengan penuh semangat mempraktikkan kebajikan moral, kejujuran, ketulusan, welas asih, kebaikan hati, tanpa kekerasan, dan toleransi terhadap semua manusia. Beliau mendorong kebebasan beragama dan memperhatikan kebutuhan orang-orang di pedalaman yang sulit dijangkau. Raja Asoka menangani pekerjaan kebutuhan masyarakat, seperti: mendirikan rumah sakit untuk manusia dan binatang, memasok obat-obatan, membangun taman-taman, menanam hutan-hutan kecil dan pohon-pohon di tepi jalan, menggali sumur-sumur, dan membangun tanggul-tanggul air dan rumah-rumah peristirahatan. Beliau juga melarang bertindak kejam terhadap binatang-binatang.

Pemimpin yang solutif adalah pemimpin yang memiliki daya kreativitas dan inovasi namun tidak menabrak aturan dan undang-undang yang sudah berlaku. Pemimpin *problem solver* akan bertindak dengan penuh pertimbangan

dan mengeksekusi gagasannya secara terukur dan masuk akal. Tidak akan mengambil keputusan atau menjalankan keputusan yang dari satu sisi terlihat seperti sebuah solusi tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan justru akan menimbulkan dampak atau permasalahan yang baru. Pemimpin yang solutif menawarkan *win-win solution* bagi semua pihak. Ia memberdayakan semua potensi dan energi positif yang ada untuk bersinergi lalu menghasilkan gagasan baru yang bisa diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan potensi polemik yang baru.

Contoh kebijakan pemimpin *problem solver* adalah pemimpin yang dengan tegas memangkas segala peraturan dan birokrasi yang menghambat kemudahan berinvestasi. Menyederhanakan pelayanan publik yang bertele-tele dan mengakibatkan rawan korupsi dan pungli (pungutan liar). Pemimpin yang cekatan memproses setiap keluhan warganya dan memberi solusi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sebagai konstituen atau masyarakat yang akan memilih calon pemimpinnya perlu memahami ciri-ciri dan kriteria-kriteria kepemimpinan seperti dipaparkan di atas. Pemimpin yang bisa memberikan solusi dan memegang teguh konstitusi, berkomitmen menegakkan hukum dan mampu mendistribusikan keadilan sosial adalah pemimpin yang patut didukung dan diberikan kepercayaan untuk memimpin.

BAB 03

KEKAYAAN DAPAT MENGHANCURKAN ORANG BODOH, TETAPI TIDAK MENGHANCURKAN MEREKA YANG MENCARI 'PANTAI SEBERANG' (NIRVANA). KARENA NAFSU KEINGINAN MENDAPATKAN KEKAYAAN, ORANG BODOH MENGHANCURKAN DIRINYA SENDIRI DAN JUGA AKAN MENGHANCURKAN ORANG LAIN."

JADILAH PEMILIH CERDAS, TOLAK POLITIK UANG

1. UANG SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK

Uang memiliki peran yang signifikan dalam praktik politik di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia. Kepemilikan uang nampaknya merupakan modal yang tak dapat ditawar-tawar lagi bagi siapa pun yang ingin berkompetisi di kancah politik kita yang dikenal berbiaya tinggi. Memang biaya diperlukan dalam setiap Pemilihan Umum, namun yang menjadi perhatian adalah biaya yang terlalu tinggi. Biaya-biaya itu diantaranya digunakan untuk agenda mobilisasi massa, membiayai konsumsi massa, undangan dalam kegiatan kampanye atau sosialisasi. Ada pula biaya transportasi politikus itu sendiri ketika *roadshow* mendatangi konstituennya, atau pun untuk memproduksi atribut dan aksesoris (biasa disebut sebagai biaya logistik), seperti stiker, spanduk, kaos, dan lain-lain sebagai alat promosi memperkenalkan identitas kandidat yang berkampanye.

Bagi politikus yang memiliki uang atau sumber dana dalam jumlah besar maka ia dengan mudah membiayai kampanyenya. Ia mampu membayar media elektronik, media cetak, atau media sosial komersial untuk mengiklankan dirinya. Mereka juga dapat membayar lembaga survei dan konsultan politik agar elektabilitasnya di masyarakat terangkat, meskipun pada mulanya seseorang tidak dikenal dia bisa menjadi populer dalam waktu singkat. Cara-cara tersebut wajar saja dalam kondisi politik di negeri ini.

Biaya lain yang menjadi instrumen wajib bagi peserta Pemilu baik Pilkada, Pileg ataupun Pilpres, adalah biaya jasa saksi saat pemungutan suara berlangsung hingga penghitungan perolehan suara. Ini penting untuk memastikan bahwa suara yang diperoleh politikus peserta Pemilu tetap tercatat secara valid dan reliabel, tidak hilang atau berkurang ketika masuk proses penghitungan suara di tiap tingkatan verifikasi.

Selain untuk membiayai popularitas dan elektabilitas serta berbagai macam biaya logistik, dengan uang yang berlimpah seorang politikus yang elektabilitasnya rendah, bisa saja “membeli suara” atau menawarkan sejumlah uang (suap/sogokan) kepada konstituen agar mau memilih dirinya dalam proses pemilihan umum (Pemilu). Inilah salah satu gambaran praktik politik yang dikenal dengan istilah “politik uang” atau *money politics*. Perilaku *money politics* yang demikian adalah suatu bentuk pelanggaran dalam proses Pemilu.

Lebih jelas definisi dan aturan tentang politik uang dapat dilihat dalam pasal 187 A, UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliota. Di ayat (1) satu disebutkan bahwa; Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling

lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Praktik politik uang kadang dapat disamarkan atau diselubungkan dalam bentuk pemberian yang seolah-olah bukan tindakan politik uang. Misalnya dengan alasan atau istilah dana, sumbangan atau hibah ke suatu rumah ibadah, yayasan sosial, kelompok organisasi atau perkumpulan tertentu. Pola atau modus semacam ini sering dilakukan oleh para politikus kontestan Pemilu karena praktik semacam ini sulit terdeteksi. Tujuan praktik ini sangat jelas, yaitu mengharapkan timbal balik atau balas jasa berupa dukungan suara saat pencoblosan dari pihak lembaga penerima sumbangan beserta para pengikut, umat atau anggotanya.

Terkait hal ini maka hendaknya tiap-tiap pengurus wihara, cetya, klenteng, rumah ibadah umat Buddha, dan pengurus yayasan Buddhis perlu waspada dan berhati-hati terhadap modus-modus dari para politikus maupun tim suksesnya yang di masa-masa kampanye sering menawarkan bantuan-bantuan dalam bentuk sumbangan, dana, uang maupun barang yang disertai pamrih agar mendapatkan dukungan suara umat Buddha. Hendaknya rumah ibadah umat Buddha steril dari kegiatan-kegiatan kampanye politik para peserta pemilu baik secara terbuka maupun tersamarkan.

2. KESERAKAHAN SUMBER BENCANA SOSIAL

Bagaimanakah seorang umat Buddha menyikapi fenomena perilaku politikus yang penuh ambisi berkuasa serta berupaya meraih kemenangan melalui praktik politik uang (*money politics*)?

Sukses di bidang politik atau bidang profesi yang lain, seperti halnya pengusaha, karyawan, pedagang, seniman dan jenis pekerjaan apapun adalah hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat awam. Dalam Anguttara Nikaya II.65, Buddha menyatakan bahwa ada 4 keinginan yang wajar diharapkan oleh manusia biasa (yang hidup berumah tangga), yaitu:

1. Semoga saya menjadi kaya (memiliki harta yang berlimpah dan berkecukupan),
2. Semoga saya beserta keluarga dan kawan-kawan dapat mencapai kedudukan sosial yang tinggi,
3. Semoga saya selalu berhati-hati di dalam kehidupan ini, sehingga saya dapat berusia panjang,
4. Apabila kehidupan dalam dunia ini telah berakhir, semoga saya dapat terlahirkan kembali di alam kebahagiaan (surga).

Dan ada empat syarat yang harus terpenuhi untuk memperoleh keempat hal tersebut, yakni hendaknya seseorang mengembangkan empat kesempurnaan:

1. Kesempurnaan atas keyakinan,
2. Kesempurnaan atas kemoralan,
3. Kesempurnaan atas kedermawanan,
4. Kesempurnaan atas kebijaksanaan,

Mengacu pada sutta di atas, maka jelas Buddha tidak menyangkal keempat keinginan wajar tersebut. Itu merupakan tujuan hidup manusia yang masih diliputi oleh

kesenangan duniawi. Batasan keinginan yang wajar itu tentunya juga jika ditempuh dengan cara-cara yang wajar, dicapai dengan tanpa melakukan tindakan yang melanggar aturan, norma, dan hukum yang berlaku dan selaras dengan sila.

Keinginan dan ambisi yang diperoleh dengan cara-cara di luar kepatutan tentu tidak akan membuahkan kebaikan dan manfaat seperti diharapkan. Walaupun pada awalnya mungkin terasa manis namun cepat atau lambat perilaku atau cara yang kurang baik akan menghasilkan penderitaan bagi pelakunya. Seperti dinyatakan Buddha dalam *Dhammapada* IX.119 "Pembuat kejahatan hanya melihat hal yang baik, selama buah perbuatan jahatnya belum masak, tetapi bilamana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibatnya yang buruk."

Dikisahkan dalam riwayat Buddha tentang bahaya ambisi untuk berkuasa. Buddha memiliki siswa yang cukup pandai dan berpengaruh bernama Devadatta. Devadatta ini sebenarnya masih saudara sepupu dari Pangeran Siddharta (Buddha). Sejak remaja Devadatta selalu memendam rasa kebencian dan iri hati kepada Siddharta. Nafsu keinginan untuk bisa mengungguli Siddharta dipupuknya bahkan hingga ia dewasa dan menjadi salah satu murid utama Buddha. Akibat batinnya diliputi iri hati, dengki, dan keinginan untuk menjadi pemimpin *Sangha* (menggantikan posisi Buddha), Devadatta berkali-kali berusaha melukai bahkan membunuh Buddha dengan berbagai cara. Devadatta Juga menghasut Pangeran Ajatasattu, putra Raja Bimbisara, raja kerajaan Magadha. Ia menghasut pangeran dengan tujuan agar bisa menikmati fasilitas dan kekuasaan sebagai penasihat Kerajaan Magadha. Selain itu, ia berharap bisa memiliki

sekutu yang kuat agar bisa dihasut untuk menyingkirkan Buddha dan raja Bimbisara penyokong setianya. Singkat cerita Pangeran Ajattasattu berhasil dihasut oleh Devadatta bahkan dengan ambisinya secara kejam membunuh kedua orang tuanya sendiri (Raja Bimbisara dan Permaisuri Khema). Pada akhirnya Ajattasattu ketika menyadari kejahatannya dia sangat menyesal, merasa bersalah, menangis meratap, dan sangat menderita dalam penyesalannya karena telah mengikuti hasutan Devadatta untuk merebut tahta kerajaan dari ayahandanya. Menyadari bahwa Devadatta memberi pengaruh buruk bagi dia dan kerajaannya maka Ajattasattu menghentikan segala bentuk dukungan dan fasilitas yang biasa dipersembahkan untuk Devadatta. Status Devadatta sebagai penasihat kerajaan, dicopot seketika. Sedangkan nasib Devadatta lebih mengenaskan lagi, akibat dari karma buruknya yang sangat berat; menjelang akhir hayatnya, ia menderita penyakit yang sangat berat hingga muntah darah dan ketika menyadari kesalahannya lalu hendak meminta maaf kepada Buddha Gotama, alam semesta seperti menghalanginya. Ia jatuh dan ditelan oleh bumi sebelum sempat bertemu dengan Buddha (Riwayat Agung Para Buddha 1801-1900).

“Bilamana suatu perbuatan setelah selesai dilakukan membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu tidak baik. Orang itu akan menerima akibat perbuatannya dengan ratap tangis dan wajah yang berlinang air mata” (Dhammapada V.67). Demikian ambisi dan keinginan untuk berkuasa yang diperoleh dengan cara-cara yang buruk bisa mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dan diri sendiri.

Dalam *Dhammapada* XXIV.355, Buddha berujar, “Kekayaan dapat menghancurkan orang bodoh, tetapi tidak

menghancurkan mereka yang mencari 'Pantai Seberang' (nirvana). Karena nafsu keinginan mendapatkan kekayaan, orang bodoh menghancurkan dirinya sendiri dan juga akan menghancurkan orang lain."

Dalam masyarakat, kita sering melihat betapa perilaku korup kepala daerah di suatu kota, kabupaten, atau provinsi telah mengakibatkan kerusakan pada wilayah yang dipimpinnya. Tanpa kepemimpinan yang baik tentu suatu daerah menjadi tidak tertib. Infrastruktur berantakan, jalan rusak di mana-mana, tindak kejahatan dan premanisme meningkat tajam, keselamatan warga tidak terjamin. Birokrasi pun ikut korup dan tidak melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, praktik pungli dan pemalakan menjadi hal yang biasa, masyarakat selalu mengeluhkan pasokan air minum (PDAM) yang tidak lancar dan Listrik (PLN) yang sering mati. Alhasil, kondisi tersebut tentu mengganggu jalannya roda perekonomian dan bisnis. Masyarakat pun menjadi apatis dan apolitis. Mereka merasa putus asa dan masa bodoh terhadap kondisi kotanya dan tidak percaya lagi dengan proses politik (Pemilu/Pilkada). Gambaran itu dapat dilihat pada situasi yang terjadi di Medan Sumatera Utara. Tercatat dua kali berturut-turut kepala daerah di Sumatera Utara dijerat oleh KPK. Menyusul terungkap pula 38 orang anggota DPRD Sumut terlibat skandal korupsi dan kolusi.

Gambaran di atas didukung data berikut ini: Tercatat Partisipasi masyarakat untuk ikut Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) ternyata sangat rendah di Medan. Dari 2.121.551 pemilih terdaftar, hanya 36,62 persen saja yang memberikan hak pilih, sedangkan yang 63,38 persen absen datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) alias Golput. Angka ini diketahui setelah Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kota Medan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilgub yang berasal 21 kecamatan, (Detiknews, Selasa 12/3/2013). Selain itu seperti disitir viva.co.id (13/2/2018) bahwa, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (18/9/2017) menyatakan; “Selama ini yang kami catat 77 kepala daerah yang kena OTT dan 300 lebih kepala daerah terkena masalah. Kami mengapresiasi KPK.”

Sesungguhnya bagi orang yang bajik, calon pemimpin atau politikus yang bersungguh-sungguh ingin berkarya untuk masyarakat dan rakyat yang dicintainya, ia tidak perlu melakukan perbuatan yang melanggar hukum apalagi merendahkan diri dengan menunjukkan ambisi pribadinya yang dilandasi keserakahan (*lobha*) dan kehausan/nafsu (*tanha*) untuk berkuasa. Calon pemimpin yang tulus dan bersungguh-sungguh tak perlu terlalu sibuk mengiklankan dirinya dan menghamburkan biaya untuk kampanye pencitraan yang berbiaya mahal apalagi membagikan uang politik/uang suap kepada calon pemilih.

“Harumnya bunga tidak dapat melawan arah angin. Begitu pula harumnya kayu cendana, bunga tagara dan melati. Tetapi harumnya kebajikan, dapat melawan arah angin; harumnya nama orang bajik dapat menyebar ke segenap penjuru.” (Dhammapada IV.54).

Mereka yang sudah memiliki karya nyata di masyarakat, dengan sendirinya akan dicintai rakyatnya. Kemanapun mereka berada akan disambut dan diharapkan kehadirannya oleh rakyat. Tanpa banyak janji melainkan menunjukkan bukti kerja nyata, rekam jejak yang baik, hasil kerja keras sebelumnya dan keteladanan (integritas); mereka niscaya akan mendapat dukungan rakyat dengan sendirinya.

3. BEBAS DARI JEBAKAN DAN BELENGGU POLITIK UANG

Kemudian, apakah bahaya, dampak buruk, ataupun kerugian dari perilaku politik uang bagi masyarakat pemilih (konstituen) dan cara kita menghindarinya?

Selain adanya ancaman pidana bagi para pelaku politik uang bagi pihak politikus yang memberi atau menjanjikan imbalan (suap) seperti disebutkan pada pasal 187 A, UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Di ayat (1) di atas; dalam ayat (2) disebutkan Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Ketika uang yang seharusnya bisa menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sewajarnya justru disalahgunakan oleh politikus yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan mencapai kekuasaan dan memenuhi ambisi kekuasaan politik maka dampaknya menjadi sangat buruk. Praktik-praktik kotor melalui politik uang adalah bentuk kejahatan serta pembodohan terhadap masyarakat.

Satu hal yang perlu dipahami dan disadari oleh konstituen (masyarakat sebagai pemilih) adalah suatu kerugian yang amat besar bahkan sekaligus bodoh ketika warga menggadaikan atau menjual, walaupun hanya satu suara untuk nilai selembur uang yang tak seberapa. Untung atau rugi dari nilai suara kita, dapat ditelaah dari ilustrasi perhitungan sederhana berikut:

Ketika seorang politikus menjanjikan kepada konstituen untuk satu suara yang diberikannya dihargai dengan selembar uang senilai 'seratus ribu rupiah' (Rp100.000) maka sesungguhnya nilai itu sangat kecil dan merendahkan sekali. Anda sebagai konstituen mungkin pada hari itu merasa senang bisa menikmati perolehan uang Rp100.000. Uang itu bisa Anda pakai untuk berbelanja, makan enak atau membeli sesuatu yang Anda sukai. Tapi mari kita pikirkan lebih jauh, seberapa banyak makanan bisa Anda konsumsi hanya dengan uang sekian. Mungkin hanya dalam waktu 1-2 hari uang itu sudah habis dibelanjakan untuk bahan makanan. mungkin Anda bisa membeli 10 liter beras kelas standar atau untuk membeli satu-dua helai pakaian. Tapi tahukah Anda apabila politikus yang menyuap Anda atau membeli suara anda itu terpilih sebagai pemimpin (gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan atau bahkan presiden), ia selama 5 tahun kedepan akan menikmati segala kemewahan dan fasilitas negara yang nilainya berjuta-juta kali lipat dari nilai Rp 100.000,- yang anda nikmati dan habis hanya dalam waktu 1-2 hari saja. Atau jika kita bandingkan dengan kekuasaan 5 tahun yang anda berikan, jelas nilai Rp 100.000,- jika dibagi 5 tahun maka nilai suara anda hanya seharga Rp 20.000,- per tahun. Bayangkan jika itu dibagi dalam bulan apalagi hari, maka suara anda sungguh menjadi tidak berharga. Maka sesungguhnya anda telah ditipu dan dibodohi oleh politikus kotor tersebut.

Menjual suara kita dengan nilai yang sangat murah adalah wujud dari keserakahan (*lobha*). Walaupun kita dalam kondisi kesulitan dan membutuhkan uang, menjual murah suara kita dan menukarnya dengan kerugian yang mungkin dampaknya kita rasakan hingga 5 tahun ke depan adalah

perilaku tidak pantas, rendah dan tercela. Dasar dari sifat lobha (keserakahan) adalah kebodohan/kedunguan (*moha*) dan tiadanya pengetahuan (*avijja*). Sesungguhnya kita tidak bisa ditipu atau dibodohi kecuali kita sendiri memang bodoh.

Tentunya sangat memalukan jika orang mengetahui bahwa kita telah bertindak bodoh, terutama yang mengaku sebagai siswa Buddha yang maha bijaksana justru menunjukkan perilaku bodoh. Orang waras mana pun tidak ingin dianggap dan dikatakan sebagai orang bodoh. Tentang perilaku bodoh, Buddha mengingatkan kita dengan syair berikut, "Orang bodoh yang dangkal pengetahuannya, memperlakukan diri sendiri seperti musuh; ia melakukan perbuatan jahat yang akan menghasilkan buah yang pahit." (Dhammapada V.66) dan "Selama buah dari suatu perbuatan jahat belum masak, maka orang bodoh akan menganggapnya manis seperti madu; tetapi apabila buah perbuatan itu telah masak, maka ia akan merasakan pahitnya penderitaan." (Dhammapada V.69)

Penguasa yang terpilih dengan cara membeli suara itu, niscaya sepanjang berkuasa akan berupaya mengembalikan modal yang sudah ia keluarkan. Sangat besar kemungkinan penguasa itu akan melakukan korupsi dan kolusi untuk memperkaya dirinya sendiri, keluarga dan kroni-kroninya. Dengan demikian tanpa kita sadari kita telah ikut andil atas perilaku jahat dan korup dari politikus tersebut. Pemimpin yang korup tentu tidak akan peduli dengan nasib dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnnya. Dia akan ingkar, dan melanggar hukum dan konstitusi yang berlaku sejak dari semula. Pelayanan publik pun menjadi buruk, ini membuat masyarakat menjadi sengsara, negara menjadi rusak, dan dapat berujung kekacauan di masyarakat dan negara.

Perlu pula diingat, bahwa pemimpin yang buruk akan menerima akibat seperti yang dinyatakan dalam kitab *Milinda Panha*: Jika seseorang yang tidak cocok, tidak mampu, tidak bermoral, tidak layak, tidak berkemampuan, tidak berharga atas kedudukan sebagai raja, telah mendudukkan dirinya sendiri sebagai seorang raja atau seorang penguasa dengan wewenang besar, dia akan menjadi sasaran penyiksaan dan berbagai macam hukuman oleh rakyat.

Tentunya sebagai seorang siswa Buddha yang sadar, kita tak ingin melakukan karma buruk dengan terlibat atau ikut andil sebagai penyebab rusaknya tatanan masyarakat, bangsa, dan negara, hanya gara-gara tindakan bodoh kita yang menjual murah suara demi rupiah yang tak seberapa.

Terkait perilaku nafsu ingin berkuasa, Buddha mengingatkan kita dalam Dhammapada, 84: "Tidak seharusnya seseorang berbuat tercela hanya karena kepentingan dirinya sendiri ataupun karena kepentingan orang lain; pun hendaknya ia tidak menginginkan putra, kekayaan jabatan atau kesejahteraan diri sendiri dengan cara yang tidak benar. Hendaknya ia memiliki Sila (pekerti), Panna (kebijaksanaan) dan Dhamma (kebenaran)."

Secara teknis ada beberapa situasi buruk praktik politik uang yang mungkin bisa saja dilakukan oleh masyarakat. Pertama, "terima uangnya, pilih orangnya". Ini jelas-jelas membuat kita terlibat karma buruk dengan dampak negatif yang luas seperti dijelaskan pada paragraf-paragraf di atas.

Kedua, "terima uangnya, tapi jangan pilih orangnya". Ini mungkin relatif lebih baik karena setidaknya kita tidak akan memilih politikus tukang suap. Tetapi tetap saja

kita terlibat politik uang. Kedua situasi di atas tetap saja merupakan pelanggaran hukum/UU Pemilu dan harus kita hindari.

Ketiga, tolak uangnya dan jangan pilih orangnya. Ini dapat kita lakukan jika ada alternatif kandidat/calon pemimpin lain yang lebih baik. Jika tidak maka sebaiknya jangan buru-buru memutuskan bahwa calon yang menyuap itu sudah pasti buruk dan tak dapat kita pilih sama sekali. Pilihan untuk menolak uang jelas pilihan bijak karena kita tidak ikut terlibat dalam politik uang dan melakukan pelanggaran hukum. Tentu kita bisa mempertimbangkan mana diantara kandidat yang memiliki potensi sedikit lebih baik (*best of the worst*) sebagai pilihan. Memang pilihan bisa saja demikian sulit tetapi kita telah berani mengambil tanggung jawab dan konsekuensinya. Termasuk apabila pilihannya adalah tidak memilih, tetap kita harus hadir ke kotak suara dan memilih untuk tidak memilih.

Keempat, terima uangnya sebagai sebagai alat bukti. Catat dan jika perlu rekam, lalu laporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tindakan keempat ini tentu tidak mudah dan tidak semua dari kita mampu meneruskannya ke Bawaslu. Memang ini pilihan yang relatif sulit dan butuh upaya ekstra. Akibat dari pelaporan yang kita lakukan maka bisa saja peserta pemilu akan digugurkan atau didiskualifikasi dan dijera pidana sesuai UU pemilu yang berlaku. Ada cara praktis bisa kita tempuh dalam hal ini. Pelaporan bisa dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi GOWASLU (dapat diunduh melalui telepon berbasis Android *via Play Store*).

Menimbang dan menyadari bahaya dan dampak buruk dari perilaku politik uang, seorang siswa Buddha harus memiliki kesadaran untuk menghindarinya. Kita harus

menjadi komunitas yang sadar bahwa praktik politik uang hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. Oleh sebab itu, kita dapat membantu mengingatkan dan menyadarkan di antara sesama rekan, tetangga, sahabat, kerabat, saudara kita. Apabila ada kesempatan atau suatu kebetulan yang membuat kita melihat praktik politik uang (baik itu dilakukan oleh calon pemimpin atau tim suksesnya), adalah tindakan ksatria dan wujud kepedulian apabila kita dengan tegas mengingatkan si pelaku politik uang agar menghentikan perbuatan yang melanggar hukum Pemilu tersebut.

Sebagai umat beragama yang sadar akan UU Pemilu dan bahaya politik uang, kita perlu waspada akan adanya praktik politik uang dalam bentuk sumbangan, dana, hibah atau bantuan sosial yang mungkin saja secara tersamar atau terselubung masuk ke kas lembaga, yayasan, vihara tempat kita beraktivitas. Pengurus rumah ibadah, vihara, klenteng, yayasan, perkumpulan buddhis, harus kita ingatkan agar tidak bermain-main (terlibat) dalam praktik kotor ini. Ini penting demi menjaga nama baik komunitas atau lembaga agama Buddha kita.

Kesadaran berpolitik, kesadaran moral, etika dan sila yang terkendali akan dapat menjaga kita dari tindakan pelanggaran dalam proses pemilu. Belajar dari kasus negara-negara demokrasi yang cukup mapan, terutama di Eropa dan Amerika Utara, pembatasan kekuasaan uang ternyata hanya bisa efektif jika sudah terbangun publik dengan kesadaran yang tinggi. Publik semacam inilah yang saat ini mesti dibangun di Indonesia, terutama menjelang Pilkada serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota ke depan. Dengan kata lain, penggunaan kekuasaan uang (*money power*) akan

bisa dibatasi manakala proses politik makin dipahami dengan logika etik (sila) yang benar serta yang memahami hubungan-hubungan kekuasaan dalam wujud kepercayaan, mandataris dan akuntabilitas.

**“ORANG BODOH YANG
DANGKAL PENGETAHUANNYA,
MEMPERLAKUKAN DIRI SENDIRI
SEPERTI MUSUH; IA MELAKUKAN
PERBUATAN JAHAT YANG AKAN
MENGHASILKAN BUAH YANG PAHIT.”
(DHAMMAPADA V.66)**

Terakhir dalam bab ini kita dapat belajar dari pepatah Tiongkok berikut, “Keserakahan Kaisar menghancurkan negaranya sementara keserakahan pejabat menghancurkan tubuhnya.” Ini adalah nasihat Kaisar Taizong, kaisar kedua dari Dinasti Tang, kepada para pejabat pemerintah agar tidak menerima suap atau praktik korupsi dan berhati-hati sendiri. Kaisar Taizong dan pejabatnya berhasil memerintah negara dengan kebajikan dan melalui prinsip ini, ia membawa perdamaian dan stabilitas. Bersama-sama mereka membuat Dinasti Tang semakin besar dan menjadi yang paling makmur dalam sejarah Tiongkok.

BAB 04

“ADA SUATU WAWASAN DAN PEMAHAMAN YANG SUKA TIDAK SUKA HARUS KITA SADARI DAN TERIMA DENGAN LAPANG DADA.”

TOLERANSI UNTUK MENGATASI ISU SARA DAN HOAKS

1. MENERIMA PERBEDAAN DENGAN HATI TERBUKA

Berbicara toleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia tidak bisa hanya mengharapkan satu sisi pemeluk agama. Perlu adanya sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga antar pemeluk agama.

Sejak semula kita telah mempunyai pijakan yang sangat jelas dalam budaya toleransi pemeluk agama di bumi Nusantara ini melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Semboyan ini disarikan dari kitab Sutasoma, karya sastra (kakawin) seorang pujangga Buddhis zaman Majapahit, Mpu Tantular. Kutipan berikut ini berasal dari pupuh 139, bait 5. Bait ini secara lengkap seperti di bawah ini:

***Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki
rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng
Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, Bhinnêka
tunggal ika tan hana Dharma mangrwa.***

Terjemahan:

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

(Terjemahan ini didasarkan, dengan adaptasi kecil, pada edisi teks kritis oleh Dr Soewito Santoso.)

Apa yang dapat kita pelajari dari semboyan bhinneka tunggal ika yang tertulis di bawah cengkraman lambang burung garuda pancasila tersebut? Sekurang-kurangnya kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah dan kearifan budaya di zaman itu. Bahwa dahulu pun di negeri Nusantara ini sejak semula telah berkembang agama dan kepercayaan yang beraneka ragam. Sedangkan Hindu dan Buddha seperti kita tahu juga adalah agama pendatang dari Nepal dan India. Tentunya jauh sebelum kedatangan ajaran Buddha dan Hindu, ada pula keyakinan/agama lain yang bersifat sangat lokal, seperti di Jawa yang memiliki ajaran Kejawenna, Sunda dengan ajaran Sunda Wiwitan dan Kaharingan, di tanah Batak ada permalim, dan masih banyak lagi lainnya, mengingat suku bangsa di Nusantara ini sangat beragam dan wilayahnya tersebar luas. Tentunya setiap suku bangsa memiliki sistem kepercayaannya masing-masing. Di tengah keanekaragaman keyakinan yang ada saat itu, Siwa dan Buddha hadir sebagai dua agama besar pada masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Dari bukti-bukti sejarah kita ketahui kedua agama itu dapat hidup rukun saling bergandengan. Dalam sejarahnya tidak kita temukan catatan adanya perang dan pertumpahan darah dengan alasan pertentangan antar penganut agama di masa-masa itu

Negara kita ini terdiri dari beragam suku bangsa, agama dan kepercayaan, beragam ras atau warna kulit, serta berbagai golongan dan kelompok masyarakat dengan ideologi, tradisi dan adat istiadat yang beragam. Ini adalah suatu kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan. Ada suatu wawasan dan pemahaman yang suka tidak suka harus

kita sadari dan terima dengan lapang dada.

KITA TIDAK DAPAT MEMILIH
UNTUK TERLAHIR DI RAHIM IBU YANG MANA,
BERKEBANGSAAN APA, SUKU APA,
ATAU DI BAWAH ASUHAN ORANG TUA BERLATAR
BELAKANG AGAMA YANG MANA.

Ini adalah kondisi yang tidak bisa kita tolak dan hindari. Menyadari kenyataan ini, Buddha tidak menyetujui gagasan bahwa orang patut diperlakukan berbeda-beda karena silsilah kelahiran, suku atau karena kastanya. Menurut sabda Buddha dalam *Vasettha Sutta* (MN 5); Seseorang dianggap dan diperlakukan sebagai *brahmana* (orang mulia) atau bukan *brahmana*, bukan karena silsilah kelahirannya; akan tetapi seseorang patut dianggap mulia atau tidak mulia adalah karena perbuatannya.

Sutta tersebut juga menjelaskan bahwa di antara manusia, tidak ada yang benar-benar berbeda dari segi mata, hidung, telinga, rambut, dan lain-lain. Manusia tidak seperti hewan yang memiliki banyak spesies. Perbedaan yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya hanyalah persetujuan (konsensus). Sebagai contoh; jika seseorang memelihara sapi dan hidup dari pekerjaannya itu, ia disebut petani (*kassako*); hidup dengan keterampilan disebut pengrajin (*sippiko*), hidup dengan berdagang disebut pedagang (*vāṇijjo*), hidup dengan upah melayani orang disebut pegawai (*peṣṣiko*), hidup dengan mencuri disebut pencuri (*coro*), hidup dengan keterampilan memanah disebut

prajurit (*yodhājīvo*), hidup dengan melayani kegiatan ritual disebut pendeta (*yājako*), atau orang yang hidup dengan mengatur negara atau desa disebut raja (*rājā*) (SN. 608-619. p. 72). Dalam *Aggañña Sutta* juga dinyatakan bahwa karena tugas dan profesi yang seseorang kerjakan maka ia disebut *khattiyā*, *brāhmaṇā*, *vessā*, ataupun *suddā* (DN. 27. p. 413).

Sikap toleransi dan antidiskriminasi secara jelas ditunjukkan oleh Buddha terhadap sistem kasta yang berakar kuat di India waktu itu. Kasta atau warna kulit tidak menghalangi seseorang untuk menjadi umat Buddha atau masuk menjadi anggota *Sangha* (sebagai seorang biksu/ biksuni). Nelayan, tukang sapu, pelacur, brahmana atau kesatria bebas menjadi anggota *Sangha* dan memperoleh hak dan juga tingkat kedudukan yang sama. Misalnya *Upali*, seorang tukang cukur diangkat sebagai kepala dalam hal *Vinaya*. *Sunita*, tukang sapu telah ditahbiskan oleh Buddha sendiri dan akhirnya mencapai tingkat kesucian *Arahat*. *Angulimala*, seorang penjahat, ditahbiskan menjadi biksu oleh Buddha dan di kemudian hari menjadi seorang suci yang penuh welas asih. *Alavaka* yang bengis, mencari perlindungan pada Buddha dan akhirnya mencapai tingkat kesucian. *Ambapali*, seorang pelacur, menjadi biksuni dan mencapai tingkat *Arahat*. Masih banyak lagi contoh-contoh dalam kitab suci Tipitaka yang memperlihatkan bahwa pintu agama Buddha terbuka lebar bagi semua orang, tanpa memandang kasta, warna kulit, atau kedudukan.

Dalam *Buddhism in Nutshell*, Bhante Narada Mahathera menjelaskan bahwa walaupun perempuan diposisikan sangat rendah dalam budaya India, namun sikap Buddha saat itu justru sebaliknya. Buddha menghargai harkat dan martabat perempuan. Istilah *Pali* yang dipergunakan untuk menyebut

wanita ialah “*matugama*”, yang berarti masyarakat ibu. Sebagai seorang ibu, wanita menempati suatu kedudukan yang penting dalam agama Buddha. Bahkan istri dianggap sebagai “kawan terbaik” (*parama sakha*) bagi suami. Pada suatu ketika, kepada Raja Kosala yang merasa tidak senang mendengar berita bahwa permaisurinya melahirkan seorang putri, Buddha bersabda: “Seorang anak wanita, O Raja, kadang-kadang terbukti merupakan keturunan yang lebih baik daripada pria.”

Saat itu, banyak wanita yang dulunya dikucilkan dan diremehkan telah mengangkat statusnya dengan berbagai cara. Mereka memperoleh kebebasan dengan mengikuti Dharma dan memasuki Sangha. Sangha inilah, di kemudian hari terbukti merupakan berkah besar bagi banyak perempuan. Permaisuri, putri raja, anak-anak wanita keluarga bangsawan, janda-janda, ibu-ibu yang sengsara, pelacur-pelacur yang patut dikasihani; mereka meskipun berbeda dalam kasta dan kedudukan, dapat berjumpa dalam satu wadah dan menjadi setara menuju pembebasan sejati.

Dengan menyadari keniscayaan yang tak terelakkan dari hidup ini bahwa kita lahir dengan kondisi yang berbeda-beda satu sama lain maka semestinya secara bijak kita bisa melihat keindahan dari perbedaan-perbedaan tersebut. Tidak ada cara lain selain menerima dan merangkul perbedaan apa adanya. Memaksakan yang berbeda-beda itu agar menjadi seragam adalah suatu kebodohan dan kesia-siaan. Seberapa banyak perbedaan yang ada di muka bumi maka kita bisa memandang dengan bijak bahwa sebanyak itu pula kesempatan kita untuk bisa melakukan kebajikan. “Seperti dari setumpuk bunga dapat dibuat banyak karangan bunga; demikian pula hendaknya banyak kebajikan dapat

dilakukan oleh manusia di dunia ini” (Dhammapada IV.53).

Buddha ketika memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menjadi muridnya dan berhimpun dalam persaudaraan Sangha tidak pernah membedakan dari kalangan atau kasta manapun. Tidak peduli latar belakang calon siswanya, semuanya diterima, dan ketika berada dalam persaudaraan maka kasta-kasta yang selama itu melabeli mereka menjadi hilang. Setiap orang dipandang sebagai sesama makhluk yang ingin bebas dari penderitaan. Sebagaimana air samudra yang memiliki satu rasa, yaitu rasa garam (*ekaraso lonaraso*), demikian pula ajaran Buddha memiliki satu rasa, rasa pembebasan (AN. p. 1144). Sebagaimana air dari sungai-sungai berbagai arah mengalir menuju samudra yang disebut sebagai air laut, demikian pula mereka yang memasuki *Sāsana* dari berbagai kasta akan disebut sebagai petapa, putra Sakya (Samanā Sakyaputtiyā. Vin. Vol. V. p. 332; AN. p. 1144). “Walau datang dari kelahiran, nama, suku, keluarga yang berbeda, memasuki kehidupan tanpa rumah, ketika ditanya siapa kalian, kita harus menjawabnya, kita adalah petapa pengikut Sakya” (DN. 27. p. 409).

2. PEMILU, PESTA DEMOKRASI UNTUK MERAYAKAN KEBINEKAAN DAN TOLERANSI

Bagaimana sikap toleransi dapat kita terapkan secara bijak di alam demokrasi Pancasila dan di tengah keriuhan pesta demokrasi (Pemilu)?

Dalam konteks berdemokrasi, umat Buddha sekaligus sebagai warga negara Indonesia, suka - tidak suka, harus

terlibat dalam siklus lima tahunan pesta demokrasi. Pada saat pesta demokrasi kita dihadapkan pada aneka ragam pilihan tokoh dan partai dengan segala latar belakang, rekam jejak, sosok dan ideologinya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi umat Buddha, dari sekian banyak tokoh, jelas umat Buddha tidak bisa mendasarkan pilihannya semata-mata berdasarkan kesamaan keyakinan, agama, apalagi sektarian. Umat Buddha secara statistik termasuk minoritas dalam kuantitas, termasuk minoritas dari alternatif calon legislatif ataupun eksekutif dengan kesamaan agama/keyakinan untuk dipilih. Lagipula, memaksakan diri untuk hanya memilih calon pemimpin yang seagama bukan jaminan bahwa calon tersebut memiliki kualitas dan kriteria ideal yang diharapkan. Pertimbangan memilih dengan alasan sesama suku, agama, ras (warna kulit) atau segolongan (SARA) boleh-boleh saja. Tetapi jika pilihan yang hanya didasari kriteria-kriteria primordial semacam itu mengesampingkan aspek-aspek kualitas kepemimpinan ideal lainnya maka dapat dipastikan pemilu menjadi tidak berkualitas. Jika ingin mendapatkan pemimpin berkualitas hendaknya konstituen memilih berdasarkan kapabilitas, rekam jejak, moralitas, integritas dan keutamaan-keutamaan ideal kepemimpinan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Umat Buddha selalu diajarkan untuk bertindak secara realistis dan menggunakan akal sehat alih-alih menggunakan kesenangan sepihak, mengikuti emosi atau sekadar memuaskan selera yang menyenangkan atau tidak menyenangkan indria. Umat Buddha dianjurkan untuk memilih mana yang memberikan manfaat dan meninggalkan atau menjauhi yang tidak bermanfaat. Dalam *Udumbara Sutta*, Buddha berkata: "Aku tidak mengajar untuk

menjadikanmu sebagai muridku. Aku tidak tertarik untuk membuatmu menjadi muridku. Aku tidak tertarik untuk memutuskan hubunganmu dengan gurumu yang lama. Aku bahkan tidak tertarik untuk mengubah tujuanmu, karena setiap orang ingin lepas dari penderitaan. Cobalah apa yang telah Kutemukan ini, dan nilailah oleh dirimu sendiri. Jika itu baik (bermanfaat) bagimu, terimalah. Jika tidak (merugikan/tidak berguna), janganlah engkau terima (tinggalkanlah).”

Tentu demikian pula dalam pesta demokrasi, ketika hendak memilih pemimpin, umat Buddha harus mempertimbangkan prinsip meritokrasi. Yaitu memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan kapabilitasnya. Memilih pemimpin yang memiliki Integritas, apa yang diucapkan selaras dengan apa yang dilakukannya, demikian pula sebaliknya, apa yang dilakukan selaras dengan perkataannya. Seorang buddhis harus jeli melihat dan menilai calon pemimpinnya. Bukan hanya mengenalnya dari kabar burung, dari penampilan di iklan dan media, bukan pula karena menurut tim kampanye dia orang yang baik. Tetapi setelah menguji, memeriksa rekam jejak, karya-karyanya untuk masyarakat dan keteladanan dari perbuatannya. Setelah yakin bahwa calon pemimpin politik itu memiliki kualitas-kualitas yang dapat diandalkan maka sepatutnya orang tersebut dapat kita pilih. Di sinilah kesempatan umat Buddha menerapkan prinsip *Ehipassiko*.

Kata *ehipassiko* berasal dari bahasa *Pali* yaitu *ehipassika* (*Skt: ehipas̄yika*) yang terdiri dari 3 suku kata yaitu *ehi* (datang), *passa* (lihat) dan *ika* (sufiks/akhiran) Secara harfiah “ehipassika” berarti datang dan lihat. Secara singkat *ehipassiko* juga bisa berarti “mengundang untuk dilihat”, dengan pengertian “dilihat” sebagai tindakan verifikasi

atau pemeriksaan atau penyelidikan. Dalam beberapa khotbah-Nya, di antaranya *Dhajagga Sutta*, *Muluposatha Sutta*, dan *Mahanama Sutta*, Buddha menyampaikan tentang *Dhammānussati* (Skt: *Dharmānusr̥ti*, "Perenungan terhadap *Dhamma*") yang isinya mengenai sifat-sifat dari Dharma yang diajarkan Buddha. Dua dari sifat *Dhamma* tersebut adalah "*ehipassiko*" (mengundang untuk dilihat atau diverifikasi) dan "*paccattang veditabbo viññūhi*" (dipahami secara pribadi oleh para bijaksana). Berlandaskan pada prinsip ajaran ini, maka sebelum menentukan pilihan, umat Buddha yang bijak dan cerdas, haruslah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan latar belakang calon pemimpin dengan sejelas-jelasnya sehingga pilihan yang ditetapkannya akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Jika sikap ini diterapkan oleh siapapun maka niscaya hasil dari demokrasi kita adalah demokrasi yang berkualitas.

Kegaduhan politik akibat politisasi SARA bukanlah suasana pesta demokrasi yang kita harapkan. Politisasi SARA untuk menggiring pemilih agar memenangkan kandidat tertentu adalah cacat dan kemunduran dalam berdemokrasi. Ini hanya akan berujung pada perpecahan dan permusuhan. Hal ini sebisa mungkin harus kita hindari. Pada akhirnya hajatan pesta demokrasi - pemilu, haruslah membuahkan kepuasan bagi rakyat karena proses pemilu telah berhasil dilaksanakan secara LUBER, Jurdil dan berkualitas. Puncak kegembiraan pesta demokrasi adalah keberhasilan kita menemukan sosok pemimpin sesuai harapan. Pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman, pemimpin yang mengayomi, yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi, tanpa pandang bulu dan pilih kasih.

3. PEMIMPIN POLITIK HARUS MENJADI TELADAN SIKAP TOLERANSI

Rianta (Tempo.co, 2016) dalam artikelnya menyebutkan bahwa pemicu sikap intoleran bermacam-macam. Sikap intoleran yang berujung menjadi aksi kekerasan didominasi oleh perbedaan agama, keyakinan, ideologi, atau hal lain yang semakin terpolarisasi dan sulit disatukan. Lebih lanjut masih menurut Rianta, sikap intoleran muncul karena beberapa hal; Pemahaman agama dan keyakinan yang tidak utuh dan tafsir yang bias memicu sikap intoleran. Perbedaan dianggap sebagai ancaman, dan perbedaan harus dilawan, tidak ada toleransi bagi perbedaan. Kemajuan teknologi internet menjadi salah satu alat propaganda sikap intoleran. Konten di media sosial yang dapat diakses secara bebas menjadi katalisator orang atau kelompok tertentu untuk menyuburkan sikap intoleran.

Sikap permusuhan dan kebencian yang didasarkan karena ketidakmampuan menerima hakikat perbedaan adalah suatu kebodohan sekaligus kerugian. Bukan saja merugikan pihak lain, bahkan yang terburuk adalah merugikan diri sendiri. "Apabila orang bodoh melakukan kejahatan, ia tak mengerti akan akibat perbuatannya. Orang bodoh akan tersiksa oleh perbuatannya sendiri, seperti orang yang terbakar oleh api" (Dhammapada X. 136).

Sikap diskriminatif juga sebenarnya bentuk laten dari kesombongan (*manna*) yakni suatu sikap mental arogan yang merasa dirinya, kelompoknya, agamanya, sekte, atau mazhabnya lebih unggul dari orang/pihak lain. Sikap ini adalah sikap yang merusak dan merugikan diri sendiri. "Hendaklah orang menghentikan kemarahan dan

kesombongan, hendaklah ia mengatasi semua belenggu. Orang yang tidak lagi terikat pada batin dan jasmani, yang telah bebas dari nafsu-nafsu, tak akan menderita lagi.” (Dhammapada XVII.221).

Dengan mencontoh pandangan Buddha tentang toleransi beragama, Asoka membuat dekrit di batu cadas gunung (hingga kini masih dapat di baca) yang berbunyi : “...

**“ ... JANGANLAH
KITA MENGHORMAT
AGAMA KITA SENDIRI
DENGAN MENCELA
AGAMA ORANG
LAIN. SEBALIKNYA
AGAMA ORANG
LAIN HENDAKNYA
DIHORMAT ATAS DASAR
TERTENTU.**

janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya agama orang lain hendaknya dihormat atas dasar tertentu. Dengan berbuat begini kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang disamping menguntungkan pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya kita akan merugikan agama kita sendiri di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormat agamanya sendiri dengan mencela agama lain -

semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya dengan berpikir ‘bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri’ maka dengan berbuat demikian ia justeru akan merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu toleransi dan kerukunan beragamalah yang dianjurkan, dengan pengertian, bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri juga bersedia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain... ”

Sikap intoleran dan diskriminatif harus dicegah sejak dini. Pendidikan generasi muda harus mengakomodasi nilai-

nilai toleransi. Perbedaan harus dipahami sebagai kekayaan bangsa, bukan ancaman. Tidak hanya di sektor pendidikan, sikap toleransi harus mulai dibangun dalam keluarga. Sebagai tempat yang paling efektif untuk pembentukan nilai, keluarga diharapkan dapat menanamkan sikap-sikap toleransi, menghargai perbedaan sejak dini, bukan malah menyuburkan intoleransi. Para pemimpin, mulai tingkat terendah di keluarga, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara, termasuk elite politiknya harus memberikan teladan bersikap toleran serta mau menerima dan menghargai perbedaan. Sikap dan perilaku pemimpin dan elit politik akan selalu tercatat dan menjadi contoh bagi masyarakat. Pemimpin dan elite politik mempunyai masa, simpatisan, dan penggemar, yang akan meniru dan mendukung sikapnya.

4. MENGHINDARI BAHAYA UJARAN KEBENCIAN DAN HOAKS MELALUI MEDIA SOSIAL

Dalam percakapan di media sosial mudah sekali kita terpancing dalam perdebatan dan perselisihan. Kita kerap mengumbar kemarahan dan ucapan kasar yang disertai dengan kebencian. Terhadap perilaku ini Buddha dengan tegas mengajarkan kita untuk menghentikan segala perselisihan sekecil apapun. Perselisihan tidaklah berguna dan lagi-lagi hanya melukai diri sendiri. “Jangan berbicara kasar kepada siapapun, karena mereka yang mendapat perlakuan demikian, akan membalas dengan cara yang sama. Sungguh menyakitkan ucapan kasar itu, yang pada gilirannya akan melukaimu.” (Dhammapada X.133)

Media sosial atau jejaring dunia maya (Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Youtube, dan lain-lain) akhir-akhir ini sangat marak bertebaran pernyataan yang bersifat konfrontatif, permusuhan, dan mencerminkan perilaku intoleran. Bahkan kemudian diikuti dengan kecenderungan perilaku di dunia nyata, berupa tindakan terorisme, perundungan (*bullying*), hingga persekusi sekelompok orang atau umat beragama terhadap penganut agama lain. Sikap intoleran akhir-akhir ini mulai banyak kita saksikan dan baca pemberitaannya melalui media, baik cetak, televisi, daring, hingga media sosial. Biasanya peristiwa semacam ini cenderung menguat dan marak ketika mendekati masa-masa pesta Pemilu, seperti Pilkada, Pilgub, Pileg atau Pilpres. Perilaku-perilaku negatif semacam ini diduga sengaja dimunculkan untuk menimbulkan keresahan di masyarakat.

Terdapat pula kelompok-kelompok yang memang sengaja dan secara sadar memproduksi informasi-informasi yang tidak benar. Perilaku kampanye hitam yang berkembang di media sosial pun semakin tidak terkontrol bahkan dapat dikatakan mengarah ke pelanggaran norma etika dan hukum. Seperti memproduksi berita-berita bohong, berita palsu (*hoaks*), informasi meyesatkan, bahkan fitnah dan ujaran kebencian. Umat Buddha harus menghindari perilaku tersebut dan tidak turut menyebarkan. Ucapan atau ujaran yang tidak benar adalah bentuk perilaku yang tidak selaras dengan sila keempat Pancasila Buddhis, *Musavada*.

Musavada (ucapan tidak benar/menyesatkan) terjadi apabila suatu hal yang tidak benar diucapkan; mempunyai niat untuk menyesatkan; berusaha untuk menyesatkan; orang lain menjadi tersesat. *Musavada* adalah perbuatan (karma) buruk (*Akusala-kammaṭṭha*) yang tentunya akan

berakibat buruk pula bagi pelakunya. Secara spesifik bentuk dari *Musavada* yang seharusnya dihindari dan dianggap sebagai bahaya oleh siswa Buddha adalah:

1. *Pisunavaca* (memfitnah) adalah suatu istilah Pali yang terdiri dari dua kosakata, yaitu "*pisuna*" dan "*vaca*". Kata "*pisuna*" secara harfiah berarti "menimbulkan perpecahan, pertikaian dan pertengkaran". Sedangkan kata "*vaca*" berarti "ucapan" atau "perkataan". Jadi gabungan kedua kata itu berarti "mengucapkan perkataan yang dapat menimbulkan perpecahan, pertikaian, pertengkaran pada kedua belah pihak atau orang yang sebelumnya hidup dalam kerukunan. *Pisunavaca* dapat pula diartikan "menghasut" atau "memfitnah". Buah (hasil perbuatan) yang diterima pelakunya, cepat atau lambat, antara lain adalah kehilangan sahabat-sahabat tanpa sebab yang berarti dan terasing dari pergaulan.
2. *Pharusavaca* (berkata kasar), terdiri dari dua kata yaitu "*pharusa*" dan "*vaca*". Arti harfiah dari "*pharusa*" adalah "kasar" dan "*vaca*" berarti "ucapan". Gabungan dari kedua kata itu bermakna "ucapan yang kasar". *Pharusavaca* mungkin juga terdiri dari kata "*phara*", "*usa*" dan "*vaca*", di mana kata "*phara*" berarti "menyebarkan" sedangkan kata "*usa*" berarti "sakit hati, gusar atau marah". Gabungan dari ketiga kata itu berarti "mengucapkan kata-kata yang menimbulkan sakit hati atau kegusaran pada orang lain." Hasil buruk yang dididerita oleh pelakunya, antara lain adalah sering didakwa yang bukan-bukan oleh orang lain sekalipun belum tentu salah dan menerima suara-suara yang tidak enak.
3. *Samphapalapa* (bergunjing atau pembicaraan yang tidak berguna) terdiri dari dua kata yaitu "*sampha*" dan "*palapa*".

Secara harfiah “*sampha*” berarti “melenyapkan manfaat dan kebahagiaan”, sedangkan “*palapa*” berarti “ucapan” atau “perkataan”. Bila kedua kata digabungkan, berarti “mengucapkan kata-kata yang dapat melenyapkan manfaat dan kebahagiaan”. Istilah *samphapalapa* dapat di terjemahkan dengan “pembicaraan yang tidak berguna atau tidak bermanfaat.” Buah buruk yang diderita oleh pelakunya, antara lain adalah tidak dipercaya oleh orang lain dalam pembicaraan dan akan menderita penyakit yang di sebabkan karena tidak bekerjanya bagian-bagian badan jasmani secara normal (timbul gejala-gejala psikosomatis).

Hukum positif mengatur dan memberikan ancaman bagi para pelaku ujaran kebencian (*hate speech*). Bentuk-bentuk ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Polri ini dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, antara lain: Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku ujaran kebencian (sesuai isi Surat Edaran Polri) antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) [Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2)]
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (“UU 40/2008”)

(Pasal 16)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (“UU 7/2012”)
4. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial (“Perkapolri 8/2013”)

Dalam mengajarkan toleransi, lebih lanjut Buddha menasihati para siswanya agar tidak mudah tersinggung dan marah akibat serangan dari pihak lain terhadap Buddha atau ajarannya (Brahmajala Sutta); “Para biksu, jika seseorang menghinaku, Dharma (ajaran Buddha), atau *Sangha* (perkumpulan para biksu), kalian tidak boleh marah, tersinggung, atau terganggu akan hal itu. Jika kalian marah atau tidak senang akan penghinaan itu, maka itu akan menjadi rintangan bagi kalian. Karena jika orang lain menghinaku, Dharma, atau Sangha, dan kalian marah atau tidak senang, dapatkah kalian mengetahui apakah yang mereka katakan itu benar atau salah?” Selanjutnya para siswa harus bisa bersikap proposional menunjukkan mana hal yang benar sebagai benar dan salah sebagai salah, tanpa dilandasi kesenangan sepihak atau kebencian yang justru merugikan diri sendiri.

Walaupun Pemilu dimaksudkan sebagai suatu pesta demokrasi yang diharapkan dapat berjalan dalam suasana yang menyenangkan layaknya sebuah pesta. Tetapi pada kenyataannya dalam suasana kontestasi politik, atmosfer yang berkembang adalah atmosfer pertempuran antara pendukung tokoh yang satu melawan pendukung tokoh politik yang lain. Mereka saling memuji idolanya dan saling menjatuhkan lawannya. Suasana yang demikian sulit dihindari sebab pada puncaknya pemilihan adalah soal menang dan kalah. Suasana ini bisa menjadi sangat tidak sehat dan merugikan

pihak-pihak yang berlomba dalam kontestasi pemilu. Sering kita tidak menyadari bahaya dari perselisihan macam itu. Untuk itu perlu kiranya kita senantiasa mengingat sabda Buddha ini; “Kemenangan menimbulkan kebencian, orang yang kalah hidup dalam kesedihan; orang yang batinnya tenang dan damai hidup bahagia, karena ia telah mengatasi kemenangan dan kekalahan” (Dhammapada XV. 201). Dari sabda tersebut, kita diingatkan bahwa pertengkaran/perselisihan dapat berpotensi menimbulkan kebencian dan penderitaan. Perdamaian hanya dapat dicapai dengan tanpa perselisihan. Masing-masing pihak yang berselisih hendaknya menanggalkan egoisme, menumbuhkan sikap saling menghargai satu sama lain, dan bersungguh-sungguh menyelesaikan perselisihan dengan menumbuhkan welas asih.

Buddha juga mengingatkan bahwa orang yang wataknya cenderung serakah dan arogan akan cenderung menghina orang lain lewat kata-kata.

***“ORANG SEPERTI ITU TIDAK MEMILIKI KEYAKINAN
(PADA DHARMA); CENDERUNG TAMAK, KIKIR, DAN SUKA
MEMFITNAH. JIKA ENKKAU ADALAH ORANG SEPERTI
INI: TIDAK TULUS DAN BERKELAKUAN RENDAH, SUKA
MEMFITNAH, JAHAT DAN BERPERILAKU BURUK, DENGKI,
JELEK, MAKA ENKKAU LEBIH BAIK TIDAK TERLALU BANYAK
BICARA. KALAU TIDAK BEGITU, ENKKAU AKAN PERGI KE
ALAM PENDERITAAN!” (SUTTA NIPATTA 663-664).***

Komunitas beragama, khususnya umat Buddha harus selalu mengembangkan kesadaran; senantiasa eling dan waspada (*sati-sampajjana*). Terlebih di saat suhu dan suasana politik yang semakin panas. Keterlibatan kita dalam kontestasi sebagai pendukung salah satu kandidat bisa jadi tanpa disadari membuat kita hanyut dalam perselisihan dan permusuhan yang bisa menyesatkan akal sehat kita. Mengondisikan batin yang senantiasa eling dan waspada (berkesadaran dan penuh perhatian) adalah satu-satunya cara agar mental (*mind*) kita tetap waras. Senantiasa selalu berpegang pada sila (perilaku yang *fair*), selaras dengan norma dan etika dan memiliki pengendalian diri (*samvara*). “Para biksu, ketika hubungan dengan orang-orang yang bijak terjadi, mendengarkan Dharma sejati pun terjadi. Ketika mendengarkan Dharma sejati terjadi, keyakinan pun terjadi. Ketika keyakinan terjadi, perhatian yang benar pun terjadi. Ketika perhatian yang benar terjadi, kewaspadaan dan pemahaman yang jernih (*sati-sampajjana*) pun terjadi. Ketika kewaspadaan dan pemahaman yang jernih terjadi, pengendalian indera pun terjadi. Ketika pengendalian indera terjadi, tiga cara perilaku yg baik pun terjadi....” (AN 10.61)

Siswa Buddha yang bertekad melatih pengendalian diri dan mengembangkan sila, saat menggunakan media sosial mengembangkan pikiran positif sebelum menuangkan gagasan berupa ujaran atau ungkapan dalam bentuk tulisan maupun gambar-gambar. “Hendaklah orang selalu menjaga rangsangan ucapannya, hendaklah ia mengendalikan ucapannya. Setelah menghentikan perbuatan-perbuatan jahat melalui ucapan, hendaklah ia giat melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui ucapan.” (Dhammapada 232).

Dalam *Abhayarajakumara Sutta*, (MN 58), Buddha

menunjukkan faktor-faktor yang turut menentukan suatu ucapan patut dan tidak patut dikemukakan. Faktor-faktor yang utama adalah:

1. Ucapan yang diketahui oleh *Tathagata* sebagai bukan fakta, tidak benar, tidak berhubungan dengan tujuan, tidak dikehendaki, dan tidak menyenangkan orang-orang lain, *Tathagata* tidak mengemukakan ucapan-ucapan itu.
2. Ucapan yang diketahui oleh *Tathagata* sebagai fakta, benar, tidak berhubungan dengan tujuan, tidak dikehendaki dan tidak menyenangkan orang-orang lain, *Tathagata* tidak mengemukakan ucapan-ucapan itu.
3. Ucapan yang diketahui oleh *Tathagata* sebagai fakta, benar, berhubungan dengan tujuan, tetapi tidak dikehendaki dan tidak menyenangkan orang-orang lain, *Tathagata* mengetahui saat yang tepat untuk mengemukakan ucapan-ucapan itu.
4. Ucapan yang diketahui oleh *Tathagata* sebagai bukan fakta, tidak benar, tidak berhubungan dengan tujuan, tetapi dikehendaki dan menyenangkan orang-orang lain, *Tathagata* tidak mengemukakan ucapan-ucapan itu.
5. Ucapan yang diketahui oleh *Tathagata* sebagai fakta, benar, tidak berhubungan dengan tujuan, tetapi dikehendaki dan menyenangkan orang-orang lain, *Tathagata* tidak mengemukakan ucapan-ucapan itu.
6. Ucapan yang diketahui oleh *Tathagata* sebagai fakta, benar, berhubungan dengan tujuan, dan dikehendaki dan menyenangkan orang-orang lain, *Tathagata* mengetahui saat yang tepat untuk mengemukakan ucapan-ucapan itu.

Mengapa demikian? Karena *Tathagata* memiliki welas asih kepada semua makhluk hidup.

Dalam hal membagikan informasi yang didapat secara viral melalui media sosial, jangan sampai kekerasan verbal melalui tulisan terwujud dari pikiran hingga ke jari-jemari kita. Sebab itu bisa menjadi awal dari karma buruk yang nantinya kita sesali dan mengendap menjadi sampah dan kekacauan (*Klesha/Kilesa*) di batin kita.

Kiranya nasihat Buddha dalam *Suta Sutta* (AN II.179) ini dapat dijadikan pedoman; “Apabila seseorang mengemukakan hal-hal yang telah didengar, hal-hal yang telah dilihat, hal-hal yang telah diketahui, mengakibatkan kualitas batin yang buruk berkembang dan kualitas batin yang baik merosot, maka hal semacam itu tidak patut dikemukakan. Akan tetapi, apabila seseorang mengemukakan hal-hal yang telah diketahui, mengakibatkan kualitas batin yang buruk berkurang dan kualitas batin yang baik berkembang, maka hal semacam itu patut dikemukakan; dan apabila, seseorang mengemukakan hal-hal yang telah dilihat, mengakibatkan kualitas batin yang tidak baik berkembang dan kualitas batin yang baik merosot, maka hal semacam itu tidak patut dikemukakan.”

Demikian hendaknya kita semakin bijak menyaring dan membagikan informasi yang kita dapat serta senantiasa mengendalikan lisan dan tulisan kita agar terhindar dari dampak buruk media sosial yang bisa mengakibatkan kemerosotan batin kita. Di samping itu agar kita terhindar dari persoalan hukum akibat salah mengunggah informasi ataupun pernyataan-pernyataan yang tidak benar dan dapat dikenai sanksi pidana (UU ITE).

BAB 05

**BAGI PARTAI DAN CALON-CALON
KONTESTAN PEMILU SEBERAPA
KECIL PUN SUARA ADALAH SANGAT
BERARTI. TIDAK ADA SUARA YANG
DIANGGAP SIA-SIA, SETIAP SUARA
PUNYA NILAI DUKUNGAN POLITIK,
TERLEBIH DALAM SISTEM PEMILU
DENGAN PROSEDUR ONE MAN ONE
VOTE.**

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT BUDDHIS DI INDONESIA

1. PENTINGNYA KETERLIBATAN DALAM PEMILU

Masyarakat Buddhis di Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Rakyat Indonesia mau tidak mau harus terlibat dalam kegiatan prosedural politik. Persebaran umat Buddha di beberapa daerah jika ditinjau dari kacamata potensi elektoral maka patut diperhitungkan. Sebagai contoh; populasi umat Buddha di Nusa Tenggara Barat dapat menyumbang perolehan suara hingga mencapai 14.000 suara untuk seluruh provinsi. atau di Sumatera Utara mencapai 300 ribu suara potensial, Di kota dan kabupaten Semarang bisa mencapai 10 ribu suara, di Kalimantan barat mencapai 237 ribu lebih, dan seterusnya. Dengan sedikit gambaran data-data tersebut maka akan sangat rugi bagi komunitas buddhis sendiri apabila tidak memiliki kesadaran untuk menggunakan potensi hak pilihnya untuk mendorong terwujudnya partisipasi aktif dalam pemilu.

Jumlah suara pemilih umat Buddha walaupun dianggap minoritas di sebagian daerah, akan tetapi bisa menjadi jumlah yang sangat signifikan bagi kepentingan para kontestan pemilu. Bagi partai dan calon-calon kontestan pemilu seberapa kecil pun suara adalah sangat berarti. Tidak ada suara yang dianggap sia-sia, setiap suara punya nilai dukungan politik, terlebih dalam sistem pemilu dengan

prosedur *one man one vote*. Maka suara satu orang pemilih saja sangat bernilai, dapat menentukan kalah atau menangnya seorang kontestan. Dengan memahami berharganya suara kita selaku perwakilan umat Buddha di masyarakat, maka kita harus memanfaatkan potensi ini untuk berpartisipasi dalam kancah politik nasional.

Lalu bagaimana kita memanfaatkan nilai dari suara kita tersebut? Sesuai contoh yang kita dapat petik dari

**BUDDHA KETIKA
MENGAJARKAN TENTANG
DASA RAJADHARMA KEPADA
MURID-MURIDNYA SEPERTI
RAJA BIMBISARA, PANGERAN
AJATTASATTU, RAJA UDENA,
RAJA PASENADI, DAN LAIN-
LAIN JUGA ADALAH UPAYA
MEMPENGARUHI KEKUASAAN
POLITIK KERAJAAN AGAR
SELARAS DENGAN DHARMA,
DENGAN KEBENARAN.**

riwayat Buddha bahwa beliau seorang diri dapat memengaruhi kebijakan raja (melalui dasa raja Dharma) agar raja berbuat baik dan memberikan manfaat kepada rakyatnya. Maka langkah serupa (walaupun tak sama persis) dapat dilakukan oleh umat Buddha. Umat Buddha secara kolektif dapat menyuarakan aspirasinya untuk dapat dititipkan kepada calon pemimpin yang dapat dipercaya dan teruji rekam jejak dan bukti kerjanya

untuk masyarakat. Kita bisa membuat atau menawarkan kontrak politik yang nyata kepada calon pemimpin (walikota, bupati atau gubernur, anggota dewan atau bahkan presiden dan wakilnya) untuk menandatangani suatu kesepakatan; bahwa apabila suara komunitas kita percayakan kepada dia, dan kelak calon pemimpin itu menang (berkuasa) dalam

pemerintahan, selanjutnya ia akan bersedia menjalankan program-program yang kita sepakati bersama dalam kontrak politik tersebut. Tentunya program-program yang kita tawarkan haruslah yang terukur dan masuk akal serta memberi manfaat kebaikan luas baik bagi komunitas buddhis maupun masyarakat secara umum. Kontrak politik yang demikian adalah wajar dan dapat dibenarkan sejauh di dalamnya tidak disertai pemberian imbalan berupa uang atau barang (*money politics*).

Jumlah komunitas buddhis dapat dibilang kecil dan minoritas tetapi dalam kepentingan politik ini tidak dapat diabaikan dan diremehkan. Kita harus selalu ingat prinsip berikut ini; “Janganlah meremehkan kebajikan walaupun kecil dengan berkata: ‘Perbuatan bajik tidak akan membawa akibat.’ Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes, demikian pula orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan” (Dhammapada IX.122). Berdasarkan Dharma tersebut maka kita harus memiliki keyakinan, walaupun sedikit tetapi jika kita terus-menerus berkiprah dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran positif yang membangun dalam ruang demokrasi kita, niscaya cepat atau lambat akan memberikan manfaat bagi bangsa ini. Ruang demokrasi ini dapat menjadi ajang kita untuk mengaktualisasikan ajaran Buddha dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan cara ini kita berkontribusi turut serta memaknai dan mengisi kemerdekaan. Umat Buddha dapat turut meningkatkan kualitas demokrasi pancasila.

Posisi strategis kita lainnya dalam pemilu adalah

bahwa setiap individu kita mempunyai tanggung jawab pribadi dan kewajiban untuk memenangkan orang-orang baik, calon-calon pemimpin yang berkualitas dan menghadang atau mencegah calon-calon dengan niat, mental dan kualitas kepemimpinan yang buruk agar tidak menjadi penguasa yang justru bisa membahayakan negeri ini. “Bagaikan seorang saudagar yang dengan sedikit pengawal membawa banyak harta, menghindari jalan yang berbahaya, demikian pula orang yang mencintai hidup, hendaknya menghindari racun dan hal-hal yang jahat” (Dhammapada IX.123).

2. PERAN SANGHA DAN PANDITA DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK UMAT

Riwayat Agung Para Buddha mengisahkan; bahwa dengan ciri-ciri (khas) yang hanya dimiliki oleh seorang *bodhisattva* dari sejak bayi, dapat diramalkan, kelak hanya ada dua kemungkinan pencapaian *bodhisattva* ketika dewasa. Jika tidak menjadi seorang pertapa agung (guru para dewa dan manusia) maka pilihan kedua yang sudah pasti adalah menjadi pemimpin dunia (Raja) yang menjalankan roda kekuasaannya (*annacakka*) dengan landasan roda Dharma (*dhammacakka*). Ini adalah petunjuk bahwa menjadi pemimpin politik dengan landasan Dharma adalah sebuah kemuliaan yang pantas ditempuh bagi seorang buddhis.

Keterlibatan Buddha dalam pengendalian politik terlihat pada saat suku *Koliya* dan *Sakya* akan berperang demi penggunaan air sungai. Buddha Sakyamuni membujuk mereka agar tidak melakukannya dan mendamaikan mereka. Saat raja Ajattasattu mencoba menaklukkan suku *Vajji*, Buddha

menyampaikan pesan dengan cara melakukan percakapan dengan Ananda di depan menteri raja Ajattasattu, bahwa suku *Vajji* tidak dapat ditaklukkan. Dengan cara demikian Buddha meyakinkan Raja yang sangat menghormati petunjuk Buddha untuk membatalkan Rencananya.

Buddha ketika mengajarkan tentang *Dasa Rajadharma* kepada murid-muridnya seperti raja Bimbisara, Pangeran Ajattasattu, Raja Udena, Raja Pasenadi, dan lain-lain juga adalah upaya mempengaruhi kekuasaan politik kerajaan agar selaras dengan Dharma, dengan kebenaran. Sebab bagi Yang Telah Sadar (Buddha), tentunya telah tuntas dan jernih pula menyadari potensi dari kekuasaan politik untuk kebaikan dan manfaat semua makhluk. Memahami bahwa jika kekuasaan dikendalikan sesuai Dharma akan mengurangi penderitaan dan membawa kebahagiaan bagi semua makhluk.

Keteladanan dari Buddha di atas patut pula ditiru oleh para siswanya di kemudian hari, hingga di era milenial ini. Dengan tetap menjaga disiplin sila dan vinaya, para biksu dapat tetap memposisikan diri sebagai kaum cerdik pandai, yang dengan kebijaksanaannya yang bersumber pada Dharma dapat mengingatkan para pemimpin-pemimpin politik di dunia modern agar berperilaku lurus, bertidak sesuai amanat dan kepercayaan yang dimandatkan oleh rakyat.

Secara aktual, tentu kita masih ingat pada Januari 2011, gabungan 9 tokoh lintas agama, yang di dalamnya juga ada YM. Bhante Sri Pannavaro Mahathera membuat petisi yang ditujukan kepada pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam petisi itu dinyatakan 9 Kebohongan pemerintah. Sembilan pemuka agama hadir dalam acara itu adalah Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe,

Din Syamsuddin, Pendeta D. Situmorang, Biksu Pannavaro, Shalahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suseno, dan Romo Benny Susetyo.

Bagi kalangan umat Buddha sendiri, kejadian tersebut tentu juga sangat mengagetkan. Sebab dalam sejarah demokrasi Indonesia baru kali itu seorang biksu senior di Indonesia memberikan sikap yang cukup keras dan tegas terhadap pemerintah bahkan terhadap janji-janji presiden secara langsung. Walaupun sikap itu dinyatakan bersama-sama dengan tokoh-tokoh lintas agama lainnya secara kolektif kolegial. Tak alang peristiwa itu menjadi pro-kontra tersendiri di kalangan komunitas buddhis. Sebagian ada yang menyayangkan kenapa biksu terlibat politik, sebagian lagi terutama di kalangan mahasiswa buddhis, progresif seperti HIKMAHBUDHI, justru memberikan apresiasi dan dukungan penuh akan sikap Bhante Pannavaro tersebut. Apa yang ditunjukkan Bhante saat itu adalah representasi suara amanat penderitaan rakyat. Pada saat itu jelas posisi Bhante Pannavaro bukan dalam ruang politik praktis melainkan dalam mengawal kebijakan pemerintah yang punya janji-janji terhadap rakyat yang harus ia penuhi. Itu adalah perwujudan politik etik dan politik moral. Suara para ulama dan pemuka agama adalah suatu gerakan moral. Ulama adalah para penjaga moral sebab mereka tidak berafiliasi dan membawa kepentingan partai politik atau golongan politik tertentu, semata-mata hanya menyuarakan apa yang menjadi amanat rakyat secara keseluruhan.

Sikap Buddha yang bertindak sebagai penasehat bagi para raja (kepala pemerintahan) yang menjadi para penyokong Beliau adalah dapat disejajarkan dengan apa yang

ditunjukkan oleh 9 tokoh agama di atas dalam kapasitasnya sebagai pemberi peringatan kepada kepala pemerintahan. Di dalam *Cakkavati Sihanada Sutta*, Buddha berkata, “Ketika penguasa suatu negara adil dan baik para menteri menjadi adil dan baik; ketika para menteri adil dan baik, para pejabat tinggi adil dan baik; ketika para pejabat tinggi adil dan baik, rakyat jelata menjadi baik; ketika rakyat jelata menjadi baik, orang-orang menjadi adil dan baik.” Menyadari pesan Buddha di atas, maka konsekuensinya adalah umat Buddha harus peduli dengan kondisi bangsa dan dinamika demokrasinya. Dan sudah sepatutnya jika mendorong agar para penguasa bertindak benar, sesuai konstitusi, adil dan bijaksana.

Para biksu dalam misi spiritualnya sebagai pertapa yang bertujuan membebaskan diri dari samsara, tentu saja tidak pantas jika terlibat dalam hiruk-pikuk politik praktis. Terlibat secara aktif atau bahkan menjadi anggota partai, sudah barang tentu suatu pelanggaran vinaya bagi para pertapa siswa Gotama. Tetapi dengan cara bijak, tetap berhati-hati dan menjaga jarak agar tidak hanyut dalam dunia politik, para biksu sangha masih tetap bisa berkontribusi dalam ruang politik asalkan tujuannya semata-mata adalah demi menciptakan kebaikan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kebahagiaan masyarakat dan semua makhluk.

Seperti pada paparan bab awal buku ini, bahwa perlu ada kekuatan roda Dharma (*Dhammacakka*) untuk mengontrol gerak dari roda kekuasaan (*annacakka*), maka biksu sangha adalah benteng terakhir dari tegaknya *dhammacakka* ini. Dengan kebijaksanaan dan kejujuran yang mereka kembangkan melalui jalan pertapaan, para biksu bisa sewaktu-waktu menjadi penasehat bagi para pimpinan politik, agar mereka berpegang pada Dharma

dalam menjalankan roda kekuasaannya. Persis seperti peran yang ditunjukkan oleh Buddha dalam riwayatnya dengan memengaruhi para raja dan penguasa saat itu agar memimpin dengan berlandaskan *Dasa Rajadharma*.

Dengan tetap berpegang pada Dharma para biksu bahkan secara aktif bisa mendorong para *upasaka* dan bahkan pandita (yang tidak terikat pada vinaya namun teruji dalam sila dan integritas) untuk terlibat di ruang politik dengan membawa nilai-nilai Dharma. Tentunya para *pandita*, *upasaka* atau *gharavasa* (umat perumah-tangga) perlu juga dibekali dengan wawasan yang memadai tentang wawasan demokrasi dan seluk-beluk dunia perpolitikan. Dunia perpolitikan harus diwarnai dan diisi oleh orang-orang baik, berbudi pekerti luhur, berintegritas dan bersusila. Jika kita meyakini nilai-nilai Dharma dapat membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua makhluk. Tentunya tidak salah jika nilai-nilai itu kita terjemahkan dalam keterlibatan sosial kita. Salah satunya adalah dengan melibatkan nilai-nilai Buddhadharmā dalam dunia politik.

Profil seorang *Raja-dharma* seperti Asoka dapat dijadikan referensi oleh para biksu untuk menumbuhkan kesadaran dan pemikiran positif para umat Buddha agar mau terlibat dan menerjemahkan Dharma dalam ruang kepemimpinan publik. Dalam kitab *Jatakamala* pun dapat kita petik banyak kisah, bagaimana Bodhisattva berulang kali terlahir sebagai *Raja-dharma*; sebagai raja suatu bangsa, pemimpin suku, atau bahkan pemimpin para satwa (raja kera, raja rusa, raja angsa, raja burung, dan seterusnya).

Keteladanan dalam kitab Jataka dapat kita jadikan inspirasi bahwa menjadi pemimpin politik, kepala daerah, wakil rakyat atau bahkan presiden sekalipun dapat kita

tempuh sebagai wujud dari aktualisasi Dharma dan penyempurnaan *paramita*. Karena kita tahu bahwa kekuasaan struktural apabila dipegang oleh orang yang baik, jujur, tulus dan penuh welas asih, yang bertindak sesuai Dharma sangat efektif untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia dan semua makhluk.

Jika orang-orang yang berintegritas mengabdikan untuk masyarakat dan duduk sebagai pemimpin politik maka diharapkan ruang bagi politikus-politikus busuk untuk berkuasa dan menciptakan kerusakan di masyarakat semakin sempit. Dengan demikian misi yang tersirat dalam ujaran "*sabbe satta bhavantu sukhitata*" (semoga semua makhluk berbahagia) yang terkesan pasif, akan bisa kita wujudkan secara nyata dan dapat dimaknai ulang menjadi kalimat aktif; "kebahagiaan semua makhluk adalah tanggung jawab kita (siswa Buddha)."

3. MEMILIH SECARA SADAR, CERDAS DAN BERTANGGUNG JAWAB

Menurut Buddha Gotama, jika para pemimpin sebuah negara adil dan baik, kita dapat meyakinkan bahwa negara akan mencapai kemakmuran dan kemajuan. Oleh karena itu, tugas kewarganegaraan kita adalah untuk memilih kandidat yang cakap dan layak masuk menjadi pemimpin politik di tingkatan mana pun. Selanjutnya tugas seorang umat Buddha haruslah mengenali dengan benar-benar siapa calon yang akan diberikan kepercayaan (suara) itu. Siswa Buddha tidak patut bersikap masa bodoh karena ini adalah ciri dari orang yang kurang memiliki dan mengembangkan

kesadaran. Buddha senantiasa mengingatkan kita agar mengembangkan pengetahuan dan kesadaran dalam setiap aspek kehidupan.

Bagaimana seharusnya umat Buddha memilih? Umat Buddha harus memilih dengan kebijaksanaan dalam semangat "*ehipassiko*." "*Ehipassiko*," menggambarkan sifat investigasi Agama Buddha. Buddha mengecilkan "kepercayaan buta" dan mendorong murid-muridnya untuk "datang dan melihat" ajaran-ajaran untuk diri mereka sendiri dan menggunakan kebijaksanaan mereka untuk memberikan penilaian seperti dijelaskan dalam *Kalama Sutta* (AN 3.65), nasihat Buddha kepada orang-orang suku *Kalama*. "Wahai suku Kalama, Jangan begitu saja mengikuti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kata orang, koleksi kitab suci, penalaran logis, penalaran lewat kesimpulan, perenungan tentang alasan, penerimaan pandangan setelah memikirkannya, pembicara yang kelihatannya meyakinkan, atau karena kalian berpikir, 'Pertapa itu adalah guru kami'. Tetapi setelah kalian mengetahui sendiri, 'Hal-hal ini adalah bermanfaat, ini tidak tercela; ini dipuji oleh para bijaksana; ini jika dilaksanakan dan dipraktikkan akan menyebabkan kesejahteraan dan kebahagiaan', maka kalian harus menjalankannya."

Dengan cara serupa dalam konteks pemilu, jangan memilih kandidat berdasarkan desas-desus, rumor, tradisi keluarga, atau media (ini berlaku untuk media sosial arus utama dan *online*). Untuk membuat keputusan, Anda bisa membaca manifesto (materi kampanye) dari berbagai pihak, menghadiri orasi-orasi politik, dan berbicara dengan para kandidat selama masa kampanye mereka. Periksa latar belakangnya, prestasinya, karya-karyanya untuk masyarakat dan lingkungan. Menurut anda, dengan kebijaksanaan sendiri

setelah memeriksa, secara sadar tentukanlah siapa di antara kandidat itu yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, bijak, berintegritas, selaras dengan nilai-nilai raja Dharma? Bagaimana calon kandidat bisa sukses lebih besar? Dengan cara apa kandidat bisa lebih mewakili kepentingan warga baik di parlemen maupun dalam posisi eksekutif.

Buddha-dharma mengingatkan kita untuk senantiasa mengembangkan sikap peduli (*care*) sebagai perwujudan *karuna*, mengembangkan kesadaran (*awareness*) dan perhatian penuh (*mindfulness*) dalam aktivitas sehari-hari kita. Ketiga hal tersebut sebenarnya juga dapat kita kembangkan dalam praktik kehidupan berdemokrasi dan keterlibatan dalam proses pemilu. Bagaimana tiga hal itu kita kembangkan dalam konteks tersebut?

1. Sikap peduli (*care*) merupakan manifestasi dari *karuna* yaitu suatu sikap keberanian untuk hadir dimana ada penderitaan dan berupaya untuk mengatasi penderitaan itu. Dalam negara ini kita tahu masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan dalam mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan atau rumah tinggal yang layak. Di sini kita harus punya welas asih dan kepedulian (*karuna/compassion*) sekaligus kebijaksanaan (*prajna/wisdom*). Bahwa dengan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, atau bahkan jika kita punya sebuah organisasi kemanusiaan sekalipun kita tidak akan pernah cukup memiliki kapasitas dan sumberdaya untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan yang ada. Maka secara bijak kita harus melihat bahwa kekuatan untuk menjawab persoalan sosial itu adalah ada pada negara. Negara memiliki sumberdaya yang sangat besar melalui aparaturnya,

yang apabila dapat digerakkan secara efektif akan dapat lebih cepat menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Siapakah yang dapat menggerakkan aparatur negara itu? Tentu adalah pemimpin politik di berbagai tingkatan, baik itu walikota, bupati, gubernur ataupun peresiden dan para wakil rakyat - DPR). Untuk itu yang bisa kita upayakan adalah dengan terlibat dalam proses pemilu secara aktif dan sadar.

2. Dengan dilandasi kesadaran penuh (*awareness*) kita memahami konsekuensi dari sikap politik yang kita ambil. Itu artinya kita dengan penuh tanggung jawab menentukan pilihan politik, bukan sekadar ikut-ikutan atau asal-asalan. Melainkan, secara sadar memahami bahwa konsekuensi dari kontestasi demokrasi adalah siap menang dan siap kalah. Ini berarti siap jika tokoh pilihan kita gagal atau tidak terpilih. Kita harus menerima apapun hasil proses politik secara lapang dada, tidak terhanyut dalam suasana pertarungan politik yang bisa mengecewakan juga menguras emosi dan energi. Demikian pula sebaliknya, jika apa yang kita harapkan berhasil jangan pula terlalu euphoria sehingga lupa diri, arogan dan sombong karena pilihan politik kita menang. Disini kita perlu mengembangkan keseimbangan mental (*upekkha*).
3. Sadar-penuh (*mindfulness*) dapat kita kembangkan terutama ketika kita memasuki momentum paling penting dari pemilihan umum, yaitu pada hari H ketika mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pertama-tama adalah menuju TPS dengan penuh perhatian dan sadar-penuh; memasuki bilik suara dengan penuh perhatian dan sadar-penuh; memberikan suara (mencoblos atau mencontreng)

juga dengan sadar-penuh. Setiap proses dilakukan dengan sadar-penuh. Setelah itu meninggalkan bilik suara dengan tanpa beban karena tugas telah ditunaikan. Selanjutnya kita tinggal menunggu hasil dari penghitungan suara dengan batin tenang-seimbang. Apapun hasilnya kita tidak reaktif secara berlebihan.

Aspirasi politik tiap-tiap individu memang hakekatnya adalah suatu pilihan yang sangat-sangat pribadi. Artinya pilihan harus didasarkan atas prinsip kebebasan (tanpa paksaan) dan dijamin kerahasiaannya. Hal itu terbukti dalam proses memasuki bilik suara. Di sana tidak ada siapa pun yang boleh mengintip apalagi mengarahkan pilihan untuk mencoblos/mencontreng kandidat pemimpin yang seseorang sukai. Inilah prinsip pemilu yang disebut “bebas dan rahasia” yang perlu disadari oleh siapapun. Maka dari itu setiap umat Buddha dalam memberikan suara harus dalam kesadaran yang bebas, tanpa tekanan dan paksaan dari dan oleh siapa pun.

Tahapan peran aktif kita lebih lanjut adalah mengawal kinerja dari calon yang terpilih. Jika calon yang kita pilih menang sebagai pemimpin maka kita wajib menagih janji agar sang pemimpin memenuhi kontrak politik yang pernah kita sepakati bersama. Atau sekurang-kurangnya jika tidak ada kontrak politik, kita tetap bisa menjadi pendukung kritis. Jangan menjadi pendukung fanatik buta yang bersikap seolah-olah seluruh kebijakan pemimpin pilihan kita sudah pasti benar semua. Kita tidak sedang memberikan cek kosong. Tidak ada pemimpin yang sempurna dan belum tentu sepanjang masa dia menjabat akan tetap konsisten dengan sikap dan janji-janji politiknya. Untuk itu kita perlu terus mengawal dan mengawasi kinerja sang pemimpin. Jika ada

hal-hal yang sekiranya keluar dari jalur, sebagai pendukung yang peduli, kita wajib mengingatkan dan terus memberikan dukungan hingga target-target yang kita harapkan bersama untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, menyejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat benar-benar terwujud.

Sebagai penutup, sekali lagi ingatlah masa depan kotamu, daerahmu, provinsimu, negaramu ada di tanganmu. Kesejahteraan rakyat hingga lima tahun ke depan dan seterusnya ada di ujung jari kita dalam bilik pemungutan suara (Pemilu). Datanglah ke bilik kotak suara dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang calon-calon pemimpin kita, agar pilihanmu adalah yang terbaik untuk memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Gunakan hak pilihmu. Pilihlah secara bijak, sadar, cerdas dan bertanggung jawab!

Keterlibatan seorang Buddhis dalam dunia politik, pemerintahan dan ketatanegaraan haruslah hanya untuk satu cita-cita: Mewujudkan kebahagiaan bagi semua makhluk!

“Appamadena Sampadetha!

Berjuanglah dengan sungguh-sungguh!”

DAFTAR PUSTAKA

- Anuradha Seneviratna King Aśoka and Buddhism Historical and Literary Studies 1994 Buddhist Publication Society, P.O. Box 6154, Sangharaja Mawatha Kandy, Sri Lanka
- David N. Gellner, Sondra L. Hausner, and Chiara Letizia, 2016, Religion, Secularism, and Ethnicity in Contemporary Nepal
- Moragollagama Uparathana, Ven. "Politics and the role of Sangha community in Sri Lanka" PaperWilson, N. G., 2006, Encyclopedia of ancient Greece. New York: Routledge.
- Narada Mahathera, Ven. Intisari Agama Buddha (Buddhism in Nutshell), Penerbit : Yayasan Dhamma Phala, Semarang.
- Santoso, Soewito, 1975, Sutasoma, a Study in Old Javanese Wajrayana
- Scott, Rachel M, 2010. Buddhism, miraculous powers, and gender - rethinking the stories of Theravada nuns, Journal of the International Association of Buddhist Studies 33 (1-2)
- Soekarno, 2005, Dibawah Bendera Revolusi Jilid I, Jakarta: Yayasan Bung Karno, Cetakan ke 5
- Surbakti, R., 1992, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo
- Sulak Sivaraksa, 2002, "Buddhism and The Challenge of Modernity in The 21st Century" Paper for Interfaith Meeting Fes (Morocco)
- Weragoda Sarada Thero, Ven., 1993, Treasury of Truth Dhammapada, Buddha Dharma Education Association Inc. Taipei, Taiwan ROC.
- **SUTTA dan VINAYA PITAKA (Pali Text Society)**
 - Anguttara Nikaya
 - Samyutta Nikaya
 - Khuddaka Nikaya
 - Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya
 - Mahagovinda Sutta, Digha Nikaya
 - Vinaya Pitaka, Culavagga Pali
 - Dhammapada
 - Jatakamala
 - Itivutaka
- **Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang**
 - Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan

Konflik Sosial;

- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Kemensesneg RI.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2003
- UUD 1945 Pasal 22E ayat (1)
- Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) dan (2)

Website

- http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt563accb796101/keberlakuan-se-kapolri-hate-speech-dan-dampak-hukumnya#_ftn1
- https://www.kompasiana.com/sandiazjudhasmara/dalai-lama-teladan-pemimpin-otokrat-di-dunia_5500ac2da33311773511956 (Widodo Judarwanto, 10 April 2011)
- <https://samaggi-phala.or.id/naskah-dharma/vinaya-upasaka-vinaya-kebhikkhuan/>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Ashoka>
- http://www.urbandharma.org/pdf/king_asoka.pdf
- https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Thailand
- https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Nepal
- https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Sri_Lanka
- https://en.wikipedia.org/wiki/Jathika_Hela_Urumaya
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Bhutan>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_National_Happiness
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Tibet>
- https://en.wikipedia.org/wiki/14th_Dalai_Lama
- <http://www.buddhanet.net/culavaga.htm>



SERIAL BUKU PENGAWASAN PARTISIPATIF

PARTISIPASI DALAM PEMILU SECARA SADAR DAN CERDAS

*Panduan berdemokrasi dan berpolitik
yang selaras dengan Buddhadharma*

“Buku ini adalah referensi bagi para tokoh agama dalam menyampaikan materi pada masyarakat. Bawaslu berharap buku ini menjadi bahan bacaan yang dapat dipakai para tokoh agama untuk menyakinkan masyarakat bahwa semua agama mengajarkan melawan politik uang. Bahwa semua agama mengajarkan untuk tidak saling membenci sebagai bentuk politisasi SARA.

Melalui buku ini, Bawaslu mengajak tokoh agama menjadi agen untuk sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu. Sebab di dalam buku ini tertuang energi penyelenggaraan Pemilu yang berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA dalam Pemilu.”

Abhan

Ketua Bawaslu



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**BAGIAN SOSIALISASI BIRO TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU**